



---

PRODUK DOMESTIK BRUTO INDONESIA  
MENURUT PENGGUNAAN  
1999-2003

<https://www.bps.go.id>

---

*BPS* **Badan Pusat Statistik, Jakarta - Indonesia**

**PRODUK DOMESTIK BRUTO INDONESIA  
MENURUT PENGGUNAAN  
1999-2003**

<https://www.bps.go.id>

# **Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Penggunaan 1999-2003**

ISBN: 979-724-168-8

Katalog BPS: 9207.

Kode Publikasi: 06240.0302

Naskah Oleh:

Subdirektorat Neraca Konsolidasi Institusi

Direktorat Neraca Konsumsi

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh:

CV. Nasional Indah

<https://www.bps.go.id>



## KATA PENGANTAR

Produk Domestik Bruto (PDB) menurut penggunaan atau menurut pengeluaran (*GDP by expenditure*) merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menjelaskan bagaimana PDB suatu negara digunakan atau dimanfaatkan. PDB menurut penggunaan dirinci menurut komponen-komponen pengeluaran atau penggunaan, yaitu pengeluaran konsumsi rumahtangga, pengeluaran pemerintah, investasi, ekspor dan impor. PDB menurut penggunaan merupakan komplemen dari PDB menurut sektor dimana PDB menurut sektor menunjukkan kinerja ekonomi masing-masing sektor yang beroperasi di suatu negara. Selama ini data mengenai PDB Indonesia menurut penggunaan disajikan dalam suatu publikasi bersama-sama dengan data PDB Indonesia menurut sektor.

Belakangan ini terdapat tendensi kebutuhan yang meningkat terhadap data PDB Indonesia menurut penggunaan yang lebih rinci untuk dapat melihat kinerja ekonomi Indonesia dari sisi penggunaan atau sisi pengeluaran secara lebih spesifik menurut komponen-komponen PDB menurut penggunaan. Atas dasar alasan tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS), melalui publikasi dengan judul *Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Penggunaan*, menyajikan data PDB menurut penggunaan secara lebih rinci selama tahun 1999-2003. Dalam publikasi ini dapat dilihat pola dan struktur penggunaan PDB menurut komponen-komponennya secara lebih rinci, seperti pengeluaran konsumsi rumahtangga menurut komoditas, investasi menurut sektor, ekspor dan impor menurut jenis barang, dsb. Dengan data PDB menurut penggunaan yang lebih rinci dan komprehensif, analisis ekonomi Indonesia dari sisi penggunaan atau sisi pengeluaran dapat dilakukan secara lebih mendalam dan tajam. Seri data disusun mulai dari data tahun 1999 - 2003.

Semoga publikasi PDB menurut penggunaan ini bermanfaat bagi para pembaca terutama para peneliti. Saran dan kritik sangat diharapkan agar publikasi PDB menurut penggunaan pada masa yang akan datang dapat disusun lebih baik.

Jakarta, Desember 2003  
Kepala Badan Pusat Statistik,



SOEDARTI SURBAKTI  
NIP. 340001648



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel Dalam Uraian.....	iv
Daftar Gambar Dalam Uraian.....	v
Tabel-tabel Lampiran .....	vi
Bab I. Pendahuluan .....	1
Bab II. Tinjauan PDB Indonesia Menurut Penggunaan Secara Agregat, 1999-2003 .....	3
2.1 Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga.....	3
2.2 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah .....	5
2.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto .....	7
2.4 Ekspor dan Impor .....	9
2.5 Keterkaitan PMTB dengan PDB .....	12
2.6 Keterkaitan Ekspor dengan PDB .....	13
2.7 Keterkaitan PMTB dengan Ekspor .....	14
2.8 Produk Nasional Bruto dan Pendapatan Per Kapita .....	14
Bab III. Perkembangan Komponen-komponen PDB Menurut Penggunaan Secara Rinci, 1999-2003 .....	17
3.1 Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga .....	17
3.2 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah .....	19
3.3 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto .....	20
3.4 Ekspor dan Impor Barang dan Jasa.....	23
a. Ekspor Barang dan Jasa .....	23
b. Impor Barang dan Jasa .....	25
Bab IV. Kesimpulan .....	29
Lampiran A Konsep, Definisi, dan Metode Estimasi PDB Menurut Penggunaan.....	30
Tabel-tabel.....	41

## DAFTAR TABEL DALAM URAIAN

	Hal.
Tabel 2.1 Komposisi Penggunaan PDB Atas Dasar Harga Berlaku, 1999-2003 (Persen) .....	4
Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga dan Kontribusinya Terhadap Laju Pertumbuhan PDB ADH Konstan 1993, 1999-2003 (Persen) .....	5
Tabel 2.3 Pengeluaran Pemerintah, 1999-2003.....	5
Tabel 2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto, 1999-2003 .....	7
Tabel 2.5 Ekspor Barang dan Jasa, 1999-2003 .....	9
Tabel 2.6 Impor Barang dan Jasa, 1999-2003.....	9
Tabel 2.8 Keterkaitan PMTB, Ekspor, dan PDB, 1999-2003.....	13
Tabel 3.1 Distribusi Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga Menurut Komoditas Atas Dasar Harga Berlaku, 1999-2003 .....	17
Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga Menurut Komoditas ADH Konstan 1993, 1999-2003 (Persen) .....	17
Tabel 3.3 Konsumsi Kalori Perkapita Sehari Menurut Komoditas, 1999-2003 (Kalori) .....	19
Tabel 3.4 Distribusi Persentase Komponen Neraca produksi Terhadap Pengeluaran Pemerintah ADH Berlaku, 1999-2003.....	20
Tabel 3.5 Distribusi Persentase jenis barang Modal terhadap PMTB Adh Berlaku 1999-2003 .....	21
Tabel 3.6 Distribusi Persentase Sumber Perolehan Barang Modal ADH Berlaku, 1999-2003.....	22
Tabel 3.7 Laju pertumbuhan PMTB Menurut Jenis Barang Modal ADH Konstan 1993, 1999-2003 .....	23
Tabel 3.8 Ekspor barang dan Jasa ADH Berlaku, 1999-2003 (Miliar Rupiah) .....	23
Tabel 3.9 Distribusi Persentase Ekspor Barang dan Jasa, 1999-2003 .....	23
Tabel 3.10 Ekspor Barang dan Jasa ADH Konstan 1993, 1999-2003 (Miliar Rupiah) .....	24
Tabel 3.11 Laju Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa ADH Konstan 1993, 1999-2003 (Persen) ...	25
Tabel 3.12 Impor barang dan Jasa ADH Berlaku, 1999-2003 (Miliar Rupiah) .....	25
Tabel 3.13 Distribusi Persentase Impor Barang dan Jasa, 1999-2003 .....	26
Tabel 3.14 Impor Barang dan Jasa ADH Konstan 1993, 1999-2003 (Persen) .....	27

## DAFTAR GAMBAR DALAM URAIAN

	Hal.
Gambar 2.1 Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga Terhadap PDB Atas Dasar Berlaku, 1999-2003 (Persen) .....	3
Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan PMTB dan Kontribusi PMTB Terhadap PDB Indonesia, 1999-2003 (Persen) .....	6
Gambar 2.3 Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto Indonesia, 1999-2003 (Miliar Rupiah) .....	6
Gambar 2.4 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi terhadap PDB Indonesia, 1999-2003 .....	8
Gambar 2.5 Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto Indonesia, 1999-2003 .....	8
Gambar 2.6 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Ekspor terhadap PDB Indonesia, 1999-2003 .....	10
Gambar 2.7 Nilai Ekspor barang dan Jasa Indonesia, 1999-2003 (Miliar Rupiah) .....	10
Gambar 2.8 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Impor terhadap PDB Indonesia, 1999-2003 .....	11
Gambar 2.9 Nilai Impor Barang dan Jasa Indonesia, 1999-2003 (Miliar Rupiah) .....	11
Gambar 2.10 Perbandingan Rasio PMTB dan Ekspor terhadap PDB, 1999-2003 .....	13
Gambar 2.11 Rasio PMTB/Ekspor 1999-2003 .....	14
Gambar 2.12 Perbandingan PDB Perkapita, PNB Perkapita dan PN Perkapita, 1999-2003 .....	15
Gambar 3.1 Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga Menurut Komoditas ADH Berlaku, 1999-2003 (Persen) .....	18
Gambar 3.2 Persentase Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Menurut Komoditas ADH Berlaku, 1999-2003 (Persen) .....	19
Gambar 3.3 Persentase PMTB Menurut Komoditas ADH Berlaku, 1999-2003 (Persen) .....	21
Gambar 3.4 Persentase Ekspor Barang dan Jasa Menurut Komoditas ADH Berlaku, 1999-2003 (Persen) .....	24
Gambar 3.5 Persentase Impor Barang dan Jasa Menurut Komoditas ADH Berlaku, 1999-2003 .....	26
Gambar 3.6 Perbandingan Surplus (Defisit) Perdagangan Luar Negeri Indonesia, 1999-2003 (Triliun Rupiah) .....	28

## TABEL-TABEL LAMPIRAN

		Hal.
TABEL 1.	Produk Domestik Bruto Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku, 1999-2003 (Miliar Rupiah) .....	41
TABEL 2.	Produk Domestik Bruto Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 1993, 1999-2003 (Miliar Rupiah) .....	42
TABEL 3.	Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku, 1999-2003 .....	43
TABEL 4.	Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 1993, 1999-2003 .....	43
TABEL 5.	Indeks Perkembangan Produk Domestik Bruto Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku, 1999-2003 (Persen, 1993=100) .....	44
TABEL 6.	Indeks Perkembangan Produk Domestik Bruto Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 1993, 1999-2003 (Persen, 1993=100) .....	45
TABEL 7.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku, 1999-2003 (Persen) .....	46
TABEL 8.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 1993, 1999-2003 (Persen) .....	47
TABEL 9.	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Bruto Menurut Penggunaan (PERSEN, 1993=100) .....	48
TABEL 10.	Kontribusi Komponen PDB Terhadap Laju Pertumbuhan ADH Konstan 1993 (Persen) .....	49
TABEL 11.	Perkembangan Beberapa Agregat Pendapatan dan pendapatan perkapita Atas Dasar Harga Berlaku, 1999-2003 .....	50
TABEL 12.	Perkembangan Beberapa Agregat Pendapatan dan pendapatan perkapita Atas Dasar Harga Konstan 1993, 1999-2003 .....	51
TABEL 13.	Laju Pertumbuhan Beberapa Agregat Pendapatan dan Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku, 1999-2003 (Persen) .....	52
TABEL 14.	Laju Pertumbuhan beberapa Agregat Pendapatan dan Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 1993, 1999-2003 (Persen) .....	53
TABEL 15.	Perkembangan beberapa Agregat Pendapatan dan Pendapatan Perkapita ADH Berlaku.....	54
TABEL 16.	Penggunaan PDB ADH Berlaku Menurut Komoditas (Miliar Rupiah) .....	55
TABEL 17.	Penggunaan PDB ADH Konstan 1993 Menurut Komoditas (Miliar Rupiah) .....	56
TABEL 18.	Distribusi Persentase PDB ADH Berlaku Menurut Komoditas .....	57
TABEL 19.	Distribusi Persentase PDB ADH Konstan 1993 Menurut Komoditas .....	58
TABEL 20.	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga Menurut Komoditas Atas Dasar Harga Berlaku, 1999-2003 (Persen).....	59
TABEL 21.	Laju Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga Menurut Komoditas Atas Dasar Harga Konstan 1993, 1999-2003 (Persen) .....	60

TABEL 22.	Laju Pertumbuhan Indeks harga Implisit Penggunaan PDB Menurut Komoditas (Persen, 1993=100) .....	61
TABEL 23.	Kontribusi Komponen Penggunaa PDB terhadap Laju Pertumbuhan PDB ADH Konstan 1993 (Persen).....	62

<https://www.bps.go.id>



## BAB I PENDAHULUAN

Penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) dapat dilakukan dengan pendekatan produksi (*production approach*), pendapatan (*income approach*), dan pengeluaran (*expenditure approach*). PDB yang disusun melalui pendekatan produksi menjelaskan bagaimana PDB dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi yang beroperasi di suatu negara. PDB yang demikian disebut sebagai PDB menurut sektor atau biasa disebut sebagai PDB ditinjau dari sisi penyediaan (*supply side*). PDB yang disusun melalui pendekatan pengeluaran menjelaskan bagaimana PDB suatu negara digunakan atau dimanfaatkan, baik untuk memenuhi kebutuhan permintaan di dalam negeri maupun untuk memenuhi kebutuhan di luar negeri. PDB yang demikian disebut sebagai PDB menurut penggunaan (terminologi yang akan digunakan dalam publikasi ini) atau menurut pengeluaran (*Gross Domestic Product by Expenditure*), atau biasa juga disebut sebagai PDB yang ditinjau dari sisi permintaan (*demand side*).<sup>1</sup> Permintaan di dalam negeri dapat berupa konsumsi rumahtangga dan lembaga nirlaba, konsumsi pemerintah, dan pembentukan modal tetap domestik bruto; sedangkan permintaan dari luar negeri berupa ekspor. Namun, karena sebagian permintaan terhadap barang dan jasa di dalam negeri termasuk juga barang dan jasa yang berasal dari impor, maka dalam PDB menurut penggunaan, ekspor barang dan jasa dikurangi dengan impor untuk memperoleh ekspor neto. Dalam PDB menurut penggunaan, selisih permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) yang mencerminkan perbedaan statistik (*statistical discrepancy*) dicakup dalam perubahan stok (*change in stock*).

Penyusunan publikasi PDB Indonesia menurut penggunaan dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya kebutuhan terhadap data PDB menurut penggunaan, terutama yang lebih rinci untuk dapat melihat penggunaan PDB secara lebih lengkap, misalnya pengeluaran konsumsi rumahtangga yang tidak hanya disajikan secara total tetapi juga disajikan menurut jenis-jenis komoditas yang dikonsumsi; pengeluaran pemerintah dirinci berdasarkan komponen lain dari neraca produksi yaitu belanja barang, belanja pegawai, penyusutan, pajak tidak langsung dan penerimaan dari barang dan jasa; investasi yang disajikan menurut jenis barang modal, sektor dan institusi; ekspor dan impor yang disajikan menurut komoditas. Atas dasar alasan tersebut, publikasi ini disusun untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumen terhadap data PDB menurut penggunaan yang lebih rinci. Informasi yang rinci tersebut diharapkan dapat membantu pembaca terutama para peneliti untuk dapat memahami kondisi perekonomian Indonesia dari sisi permintaan (*demand side*).

---

<sup>1</sup>Di Indonesia, penghitungan PDB dilakukan hanya dengan menggunakan pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran; sedangkan penghitungan PDB dengan pendekatan pendapatan tidak dilakukan.

Dalam publikasi ini disajikan juga beberapa indikator ekonomi makro yang dapat diperoleh dari data PDB menurut penggunaan, seperti elastisitas pengeluaran rumah tangga, *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR), rasio ekspor terhadap PDB, dsb. Pembahasan dimulai dengan topik tinjauan PDB Indonesia menurut penggunaan secara agregat. Selanjutnya dibahas perkembangan komponen-komponen PDB menurut penggunaan secara rinci. Pada bagian terakhir diberikan suatu kesimpulan dari uraian sebelumnya. Adapun periode yang dicakup pada pembahasan ini adalah periode tahun 1999-2003. Status data tahun 2002 adalah data sementara dan tahun 2003 adalah data sangat sementara.

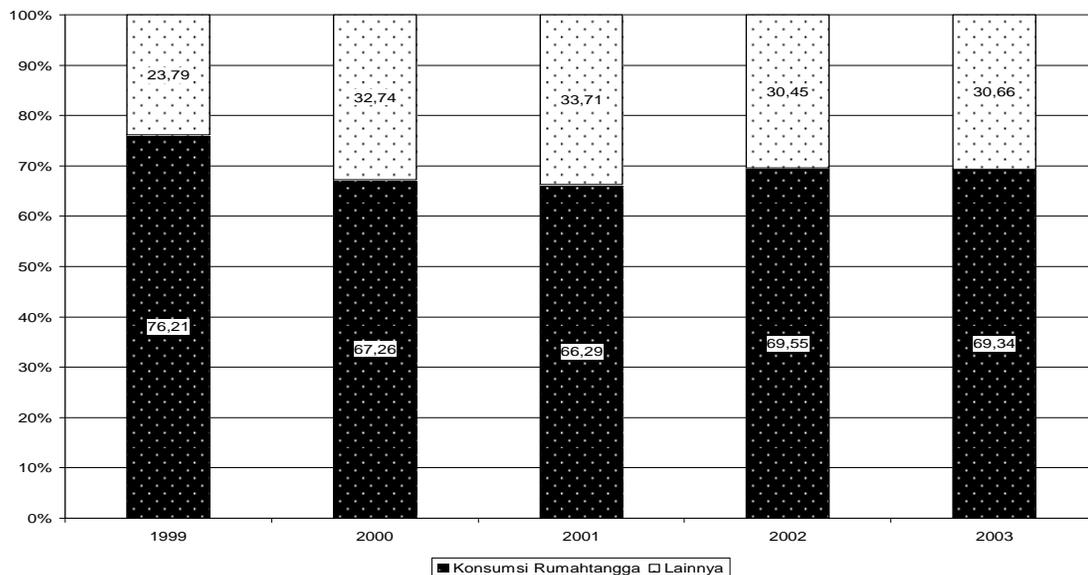
<https://www.bps.go.id>

**BAB II**  
**TINJAUAN PDB INDONESIA MENURUT PENGGUNAAN**  
**SECARA AGREGAT, 1999-2003**

**2.1 Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga**

Pengeluaran konsumsi rumahtangga merupakan komponen yang dominan dalam penggunaan PDB. Kontribusi pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap total PDB dapat dilihat pada tabel 2.1 dan gambar 2.1. Pada tabel tersebut tampak bahwa sejak tahun 1999 hingga tahun 2003 porsi pengeluaran konsumsi rumahtangga selalu lebih dari setengah total PDB dan memberikan tendensi cenderung menurun. Rata-rata persentase pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap PDB selama 1999-2003 adalah sebesar 69,73 persen per tahun. Pada tahun 1999, persentase pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap PDB atas dasar harga berlaku berjumlah 76,21 persen; pada tahun 2000 dan 2001 persentase tersebut turun menjadi masing-masing 67,26 persen dan 66,29 persen, tetapi tahun 2002 persentase tersebut naik menjadi 69,55 persen, lalu turun lagi menjadi sebesar 69,34 persen pada tahun 2003. Tetap tingginya permintaan barang dan jasa yang dikonsumsi rumahtangga tahun 2002 dikarenakan semakin maraknya promosi barang dan jasa diberbagai mass media yang mendorong masyarakat berperilaku meningkatkan konsumsi, terutama dengan membanjirnya produk barang impor yang lebih kompetitif daripada produk dalam negeri.

Gambar 2.1 Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga Terhadap PDB  
Atas Dasar Harga Berlaku, 1999-2003 (Persen)



Tabel 2.1 Komposisi Penggunaan PDB Atas Dasar Harga Berlaku, 1999-2003 (Persen)

Jenis Penggunaan	1999	2000	2001	2002	2003
Konsumsi Rumahtangga	76,21	67,26	66,29	69,55	69,34
Lainnya	23,79	32,74	33,71	30,45	30,66
Jumlah PDB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumahtangga (dihitung atas dasar harga konstan 1993) juga berfluktuasi dengan rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumahtangga sejak tahun 1999 hingga 2003 adalah sebesar 3,79 persen per tahun, rata-rata tersebut dihitung dengan menggunakan rata-rata hitung. Laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumahtangga yang tertinggi terjadi pada tahun 1999 yaitu sebesar 4,63 persen dan terendah pada tahun 2000 yaitu sebesar 3,13 persen. Tahun 2003 laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumahtangga sebesar 4,02 persen sedikit lebih rendah dari laju pertumbuhan PDB yang sebesar 4,10 persen.

Kontribusi pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap laju pertumbuhan PDB tahun 1999 yaitu sebesar 4,63 persen, dengan kontribusi komponen PDB lainnya berjumlah sebesar -2,36 persen, sehingga menghasilkan laju pertumbuhan PDB sebesar 0,79 persen. Dengan perkataan lain 398,53 persen dari laju pertumbuhan PDB yang sebesar 0,79 persen berasal dari pengeluaran konsumsi rumahtangga, sedangkan sisanya sebesar -298,53 persen berasal dari komponen PDB lainnya (lihat tabel 2.2). Sejak tahun 2000 hingga tahun 2003 persentase kontribusi konsumsi rumahtangga terhadap laju pertumbuhan PDB sudah dibawah 100 persen. Dengan kata lain peran penggerak PDB tidak lagi hanya bertumpu pada pertumbuhan konsumsi rumahtangga semata tetapi juga disebabkan oleh pertumbuhan komponen-komponen penggunaan PDB lainnya. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2003 bahwa kontribusi pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap laju pertumbuhan PDB tahun 2003 yaitu sebesar 2,79 persen, dengan kontribusi komponen PDB lainnya berjumlah sebesar 1,31 persen, sehingga menghasilkan laju pertumbuhan PDB sebesar 4,10 persen. Dengan perkataan lain hanya 68,06 persen saja dari laju pertumbuhan PDB yang sebesar 4,10 persen berasal dari pengeluaran konsumsi rumahtangga, sedangkan sisanya sebesar 231,94 persen berasal dari komponen PDB lainnya.

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga dan Kontribusinya Terhadap Laju Pertumbuhan PDB ADH Konstan 1993, 1999-2003 (Persen)

Tahun	Laju Pertumbuhan Konsumsi Rumah tangga	Kontribusi Konsumsi Rumah tangga terhadap Laju Pertumbuhan PDB	Kontribusi Komponen PDB Lainnya terhadap Laju Pertumbuhan PDB	Laju Pertumbuhan PDB
1999	4,63	3,15 (398,53)	-2,36 (-298,53)	0,79 (100,00)
2000	3,13	2,21 (44,94)	2,71 (55,06)	4,92 (100,00)
2001	3,36	2,34 (67,68)	1,12 (32,32)	3,45 (100,00)
2002	3,81	2,64 (71,66)	1,05 (28,34)	3,69 (100,00)
2003	4,02	2,79 (68,06)	1,31 (31,94)	4,10 (100,00)

## 2.2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Fluktuasi kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap PDB sejak tahun 1999 hingga tahun 2003 terus meningkat. Pada tahun 1999 kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah berjumlah 6,60 persen lalu meningkat menjadi 7,18 persen pada tahun 2000 (lihat tabel 2.3 dan gambar 2.2). Demikian pula pada 2001 dan tahun 2002 kontribusi pemerintah menjadi masing-masing sebesar 7,73 persen dan 8,21 persen. Dan pada tahun 2003 kontribusi konsumsi pemerintah terhadap PDB menjadi berjumlah 9,16 persen.

Tabel 2.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, 1999-2003

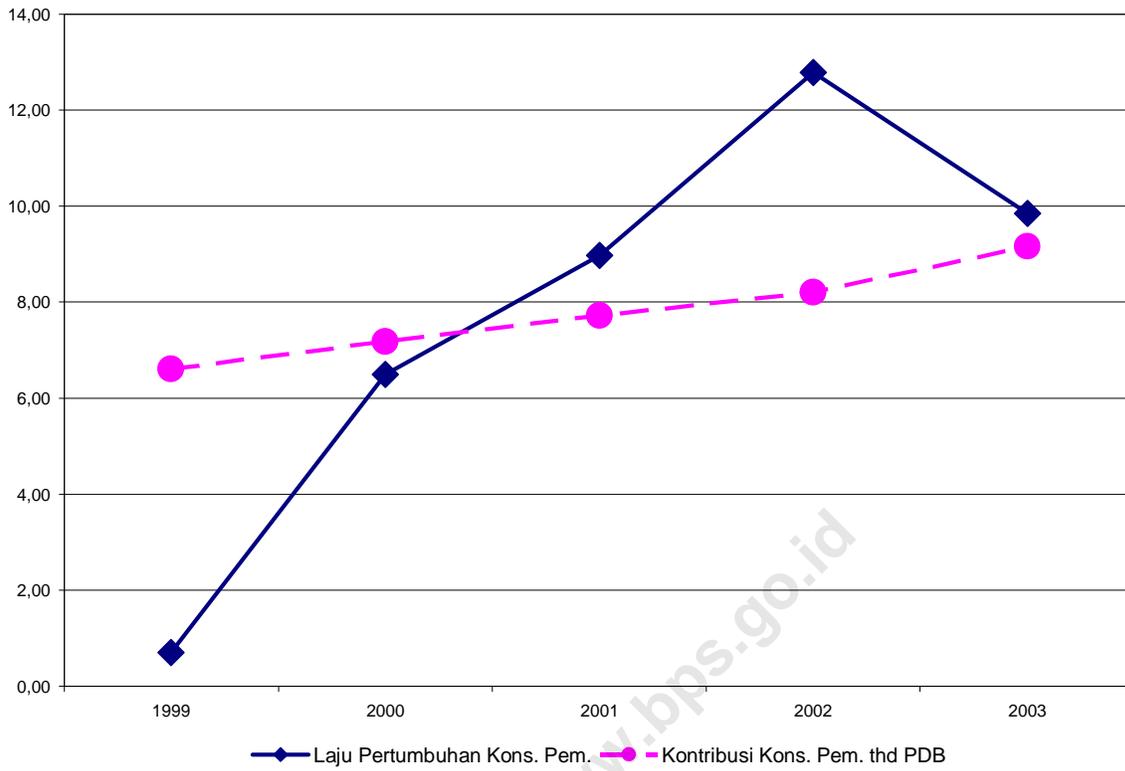
Rincian	1999	2000	2001	2002	2003
Nilai (Miliar Rupiah)					
a. Adh berlaku	72 631,3	90 779,7	113 416,1	132 218,7	163 701,3
b. Adh konstan 1993	27 284,7	28 767,8	31 351,5	35 362,4	38 842,8
Laju Pertumbuhan <sup>1</sup> (%)	0,69	6,49	8,98	12,79	9,84
Kontribusi thd PDB <sup>2</sup> (%)	6,60	7,18	7,73	8,21	9,16

<sup>1</sup>Perhitungan atas dasar harga konstan 1993

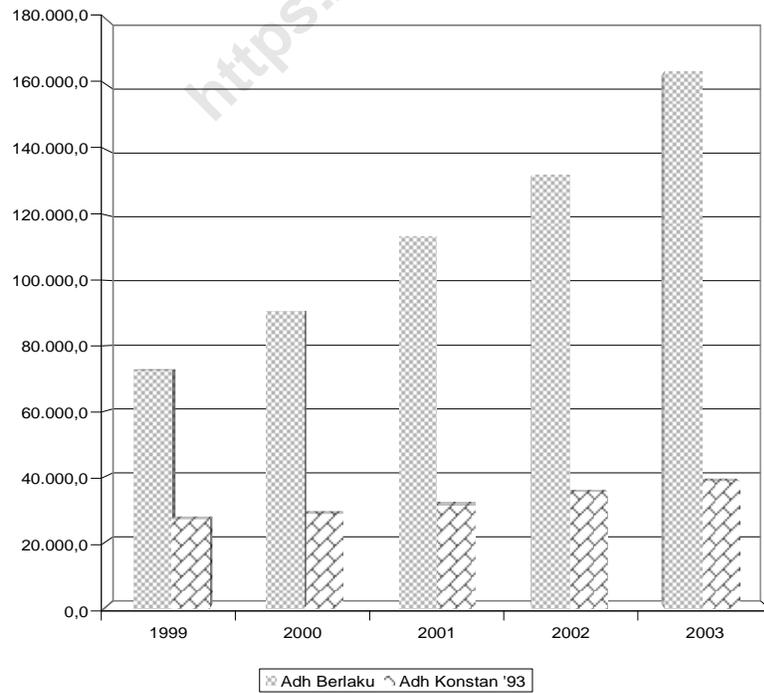
<sup>2</sup>Perhitungan atas dasar harga berlaku

Rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah selama tahun 1999 hingga tahun 2003 adalah sebesar 7,76 persen per tahun. Pada tahun 1999 laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah naik sedikit dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,69 persen, dan tahun 2000 kenaikannya meningkat menjadi 6,49 persen. Dua tahun berikutnya yaitu tahun 2001 dan tahun 2002 laju pertumbuhan konsumsi pemerintah meningkat lagi menjadi masing-masing sebesar 8,98 persen dan 12,79 persen. Akhirnya pada tahun 2003 laju pertumbuhan konsumsi pemerintah menjadi sebesar 9,84 persen. Tingginya pengeluaran konsumsi pemerintah terutama dikarenakan banyaknya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah di dalam penyelenggaraan pemilu dan sidang umum tahun 1999 serta persiapan pemilihan umum tahun 2004.

Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Konsumsi Pemerintah terhadap PDB Indonesia, 1999-2003 (Persen)



Gambar 2.3 Nilai Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Indonesia, 1999-2003 (Miliar Rupiah)



### 2.3. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Indonesia baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 1993 meningkat dari tahun 1999 hingga tahun 2003. Pada tahun 1999, PMTB di Indonesia atas dasar harga berlaku berjumlah Rp 226.015,8 miliar. Pada tahun 2000 dan tahun 2001 meningkat masing-masing menjadi sebesar Rp 275.881,3 miliar dan Rp 314.065,8 miliar. Akhirnya pada tahun 2002 dan tahun 2003 PMTB atas dasar harga berlaku menjadi masing-masing berjumlah Rp 326.165,2 miliar dan Rp 352.360,5 miliar. Demikian pula PMTB atas dasar harga konstan 1993 meningkat dari Rp 78.284,7 miliar pada tahun 1999 menjadi Rp 96.695,7 miliar pada tahun 2003 (lihat tabel 2.4, gambar 2.4, gambar 2.5). Peningkatan PMTB dari tahun 1999 hingga tahun 2003 menunjukkan adanya *recovery* perekonomian Indonesia pasca krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997.

Laju pertumbuhan PMTB tahun 1999 turun sebesar - 18,67 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan laju pertumbuhan pada tahun 1999 tersebut sedikit berkurang jika dibandingkan dengan yang terjadi pada laju pertumbuhan pada tahun 1998 yang merupakan masa puncak krisis ekonomi. Pada tahun 2000 hingga tahun 2003 laju pertumbuhan PMTB terus meningkat walaupun cukup berfluktuatif kenaikannya. Pada tahun 2000 laju pertumbuhan PMTB meningkat sebesar 14,18 persen dan pada tahun 2003 meningkat sebesar 1,36 persen.

Rata-rata kontribusi PMTB terhadap PDB atas dasar harga berlaku sejak tahun 1999-2003 adalah sebesar 20,75 persen per tahun. Selama periode tersebut kontribusi PMTB terhadap PDB setiap tahunnya cukup stabil. Distribusi persentase PMTB terhadap PDB pada tahun 1999 berjumlah 20,55 persen, kontribusi tersebut mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2000. Pada tahun 2003 kontribusinya menjadi 19,72 persen.

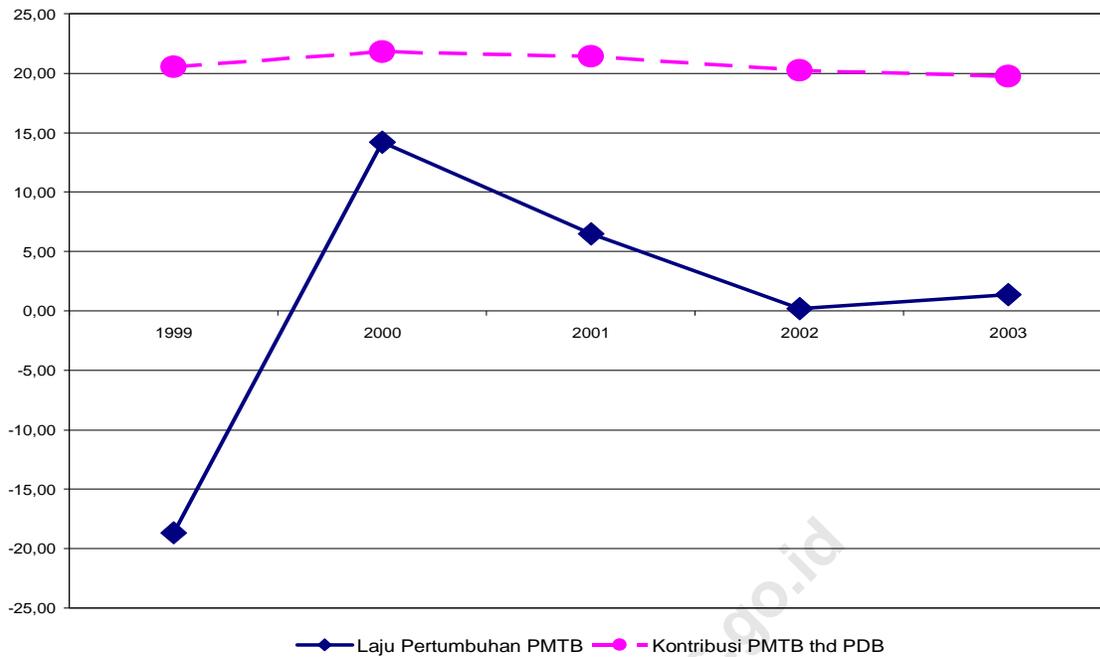
Tabel 2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto, 1999-2003

Rincian	1999	2000	2001	2002	2003
Nilai (Miliar Rupiah)					
a. Adh berlaku	226 015,8	275 881,3	314 065,8	326 165,2	163 701,3
b. Adh konstan 1993	78 284,7	89 389,1	95 197,1	95 396,9	96 695,7
Laju Pertumbuhan <sup>1</sup> (%)	-18,67	14,18	6,50	0,21	1,36
Kontribusi thd PDB <sup>2</sup> (%)	20,55	21,81	21,40	20,25	19,72

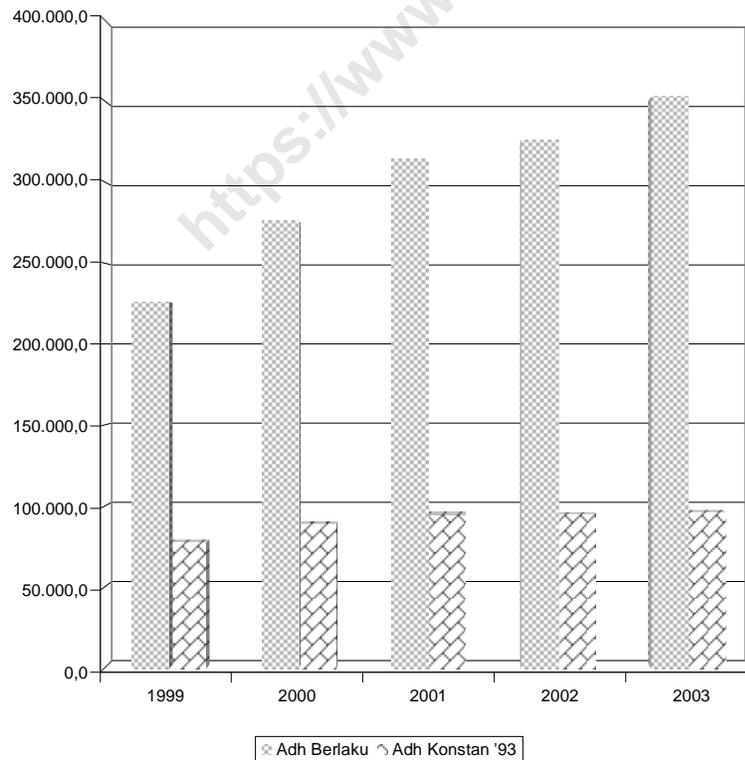
<sup>1</sup>Perhitungan atas dasar harga konstan 1993

<sup>2</sup>Perhitungan atas dasar harga berlaku

Gambar 2.4 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi PMTB terhadap PDB Indonesia, 1999-2003 (Persen)



Gambar 2.5 Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto Indonesia, 1999-2003 (Miliar Rupiah)



## 2.4. Ekspor dan Impor

Rata-rata kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB sejak tahun 1999 hingga tahun 2003

berjumlah 37,61 persen per tahun, dan untuk impor barang dan jasa besarnya 30,25 persen per tahun. Selama tahun 1999 hingga tahun 2003 tersebut kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB selalu lebih besar dibandingkan kontribusi impor barang dan jasa terhadap PDB. Dengan kata lain selama periode tersebut di Indonesia terjadi surplus perdagangan luar negeri setiap tahunnya. Pada tahun 1999 kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB sebesar 35,51 persen dan untuk impor barang dan jasa sebesar 28,53 persen atau terjadi surplus perdagangan luar negeri sebesar 6,98 persen. Sementara itu pada tahun 2003 surplus perdagangan luar negeri di Indonesia adalah sebesar 5,54 persen dari total PDB Indonesia, dimana kontribusi ekspor terhadap PDB sebesar 31,24 persen dan kontribusi impor sebesar 25,70 persen (lihat tabel 2.5 dan tabel 2.6 serta gambar 2.6, gambar 2.7, gambar 2.8 dan gambar 2.9).

Tabel 2.5. Ekspor Barang dan Jasa, 1999-2003

Rincian	1999	2000	2001	2002	2003
Nilai (Miliar Rupiah)					
a. Adh berlaku	390 560,1	542 992,4	624 340,8	577 081,5	558 091,4
b. Adh konstan 1993	91 863,6	116 193,6	119 600,2	118 920,0	123 724,0
Laju Pertumbuhan <sup>1</sup> (%)	-31,80	26,48	2,93	-0,57	4,04
Kontribusi thd PDB <sup>2</sup> (%)	35,51	42,93	42,54	35,83	31,24

<sup>1</sup> Perhitungan atas dasar harga konstan 1993

<sup>2</sup> Perhitungan atas dasar harga berlaku

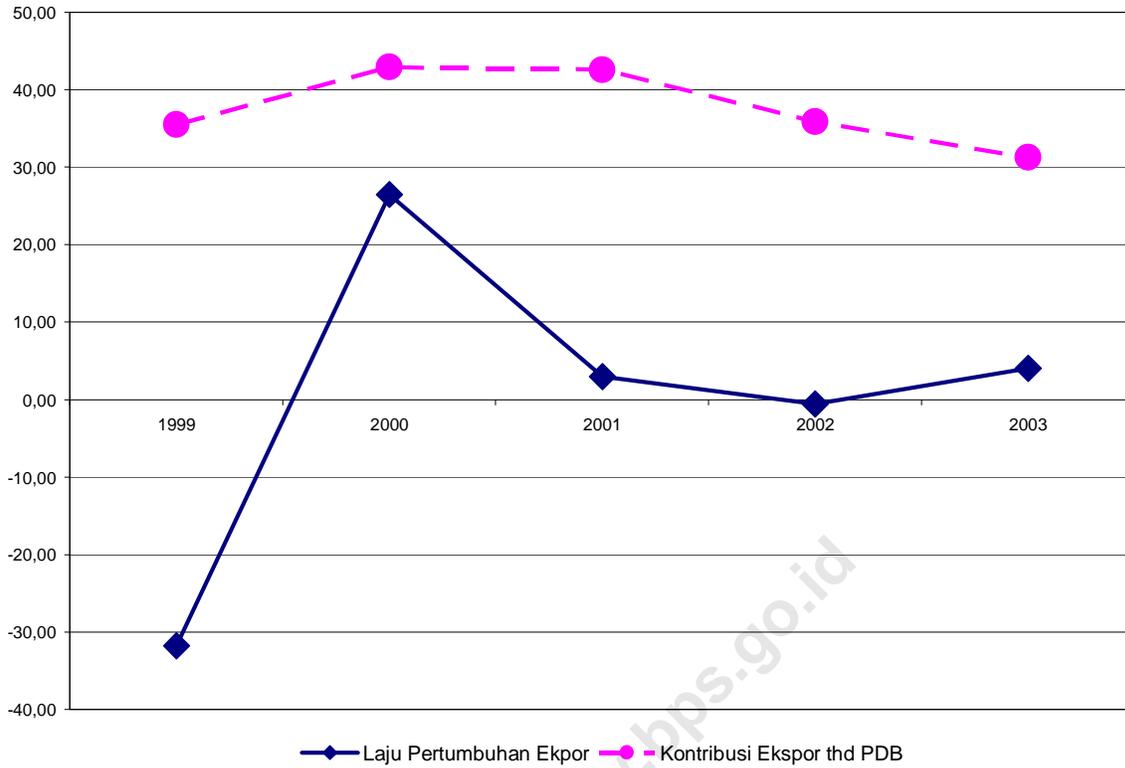
Tabel 2.6 Impor Barang dan Jasa, 1999-2003

Rincian	1999	2000	2001	2002	2003
Nilai (Miliar Rupiah)					
a. Adh berlaku	313 720,2	423 317,9	503 482,3	471 188,4	459 096,5
b. Adh konstan 1993	81 688,3	98 916,6	107 027,7	101 727,1	103 724,6
Laju Pertumbuhan <sup>1</sup> (%)	-40,68	21,09	8,20	-4,95	1,96
Kontribusi thd PDB <sup>2</sup> (%)	28,53	33,47	34,31	29,26	25,70

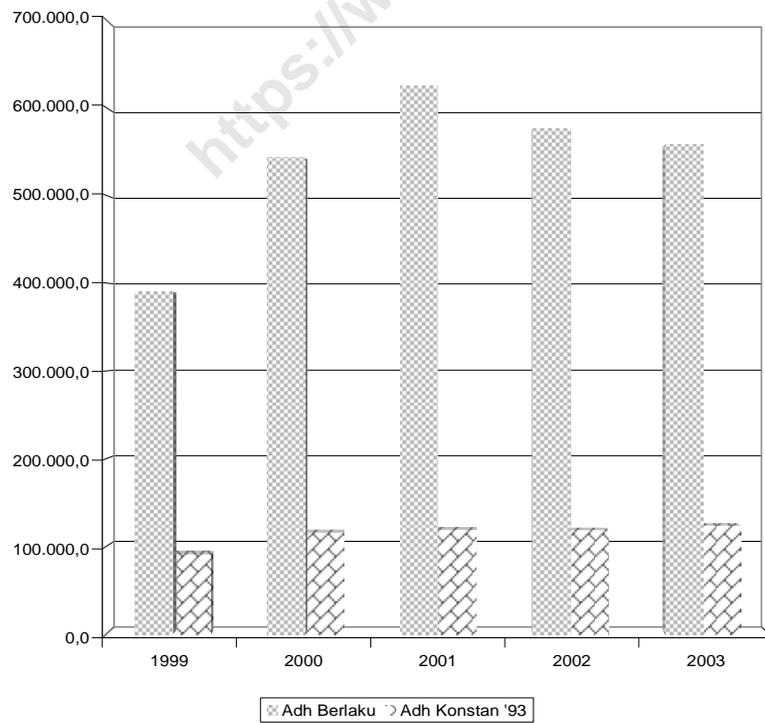
<sup>1</sup> Perhitungan atas dasar harga konstan 1993

<sup>2</sup> Perhitungan atas dasar harga berlaku

Gambar 2.6 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Ekspor terhadap PDB Indonesia, 1999-2003 (Persen)

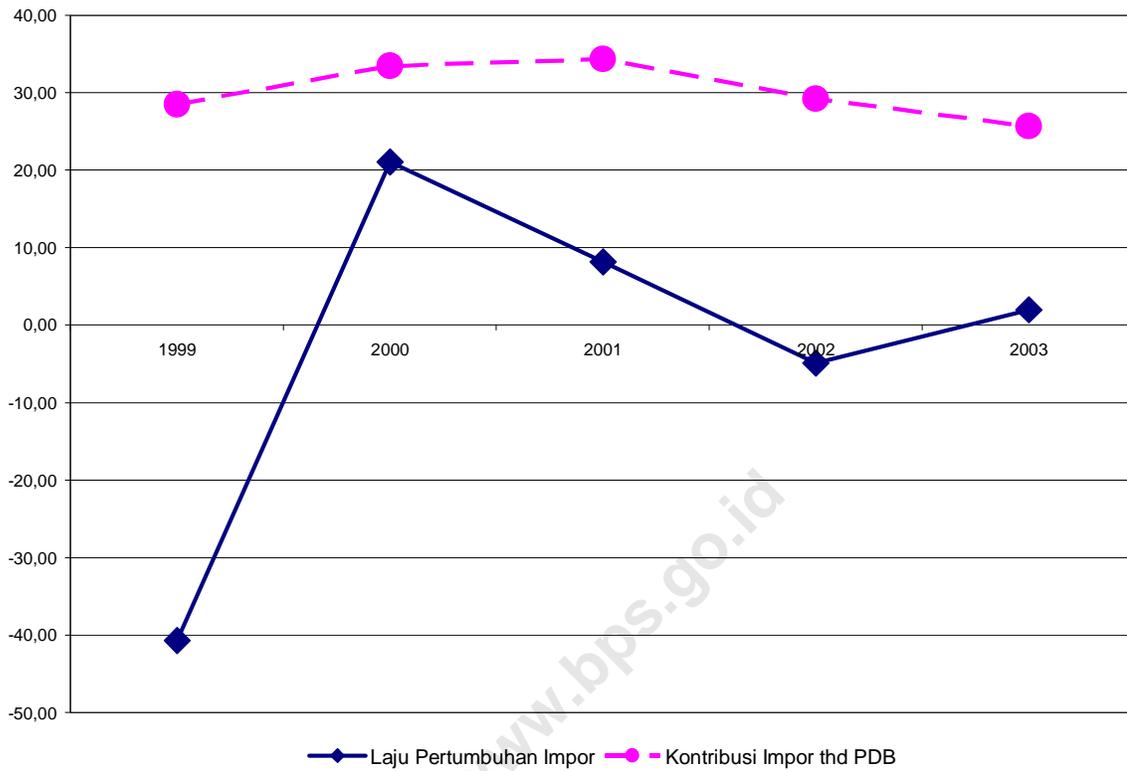


Gambar 2.7 Nilai Ekspor Barang dan Jasa Indonesia, 1999-2003 (Miliar Rupiah)

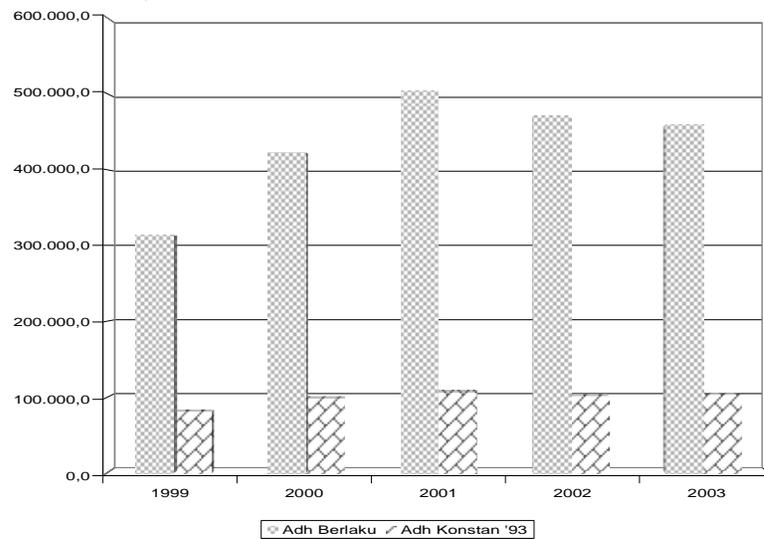


Gambar 2.8 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Impor terhadap PDB Indonesia,

1999-2003 (Persen)



Gambar 2.9 Nilai Impor Barang dan Jasa Indonesia, 1999-2003 (Miliar Rupiah)



Pada tabel 2.5 dan tabel 2.6 di atas dapat dilihat bahwa kegiatan ekspor dan impor sangat

dominan dalam penciptaan PDB (jumlah kontribusi ekspor dan impor terhadap PDB lebih dari 50 persen). Hal ini berarti pula lebih dari separuh besaran PDB Indonesia ditentukan oleh kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan luar negeri.

Selama tahun 1999 hingga tahun 2003 pola laju pertumbuhan ekspor maupun impor barang dan jasa tampaknya mirip yaitu mengalami penurunan pada tahun 1999 dan tahun 2002 dan pada tahun 2000, tahun 2001 serta tahun 2003. Kenaikkan laju pertumbuhan ekspor dan impor tertinggi terjadi pada tahun 2000. Rata-rata laju pertumbuhan ekspor barang dan jasa selama periode tersebut sekitar 0,22 persen per tahun, sementara untuk impor barang dan jasa sebesar -2,87 persen per tahun. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa pada tahun 1999 tercatat -31,80 persen dan pada tahun 2003 tercatat sebesar 4,04 persen. Pada sisi yang lain, laju pertumbuhan impor barang jasa pada tahun 1999 tercatat -40,68 persen dan pada tahun 2003 tercatat 1,96 persen.

## 2.5. Keterkaitan PMTB dengan PDB

Keterkaitan PMTB dengan PDB salah satu digambarkan dengan ukuran *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Ukuran ini merupakan rasio (perbandingan) antara PMTB dengan tambahan PDB. Rasio ini pada tahun 1999 diperkirakan sebesar -4,77 dan meningkat menjadi 2,93 pada tahun 2000. Pada tahun 2001 nilai ICOR 1,46, tahun 2002 sebesar 0,05 dan pada tahun 2003 sebesar 0,30. Secara teoritis dari ICOR yang cenderung menurun dan di bawah nilai 1 selama 1999-2003 dapat disimpulkan bahwa telah terjadi efisiensi karena dengan adanya sedikit tambahan investasi telah dapat meningkatkan nilai output (PDB). Hal ini diperlihatkan oleh laju pertumbuhan PMTB yang lebih rendah dari laju pertumbuhan PDB terutama pada tahun 2002 dan 2003 (laju pertumbuhan PMTB pada tahun 2002 dan 2003 masing-masing 0,21 persen dan 1,36 persen, sedangkan laju pertumbuhan PDB masing-masing 3,69 persen dan 4,10 persen. (Lihat tabel 2.2 dan 2.4 pada bagian sebelumnya).

Ukuran rasio PMTB terhadap PDB menunjukkan rasio yang menurun dari tahun 1999 sampai tahun 2003 (lihat tabel 2.7 dan gambar 2.4 serta gambar 2.10). Rasio ini mencerminkan besarnya pengeluaran investasi untuk membentuk PDB. Rasio yang semakin menurun mencerminkan porsi pengeluaran PMTB yang semakin kecil untuk membentuk PDB.

Tabel 2.7 Keterkaitan PMTB, Ekspor, dan PDB, 1999-2003

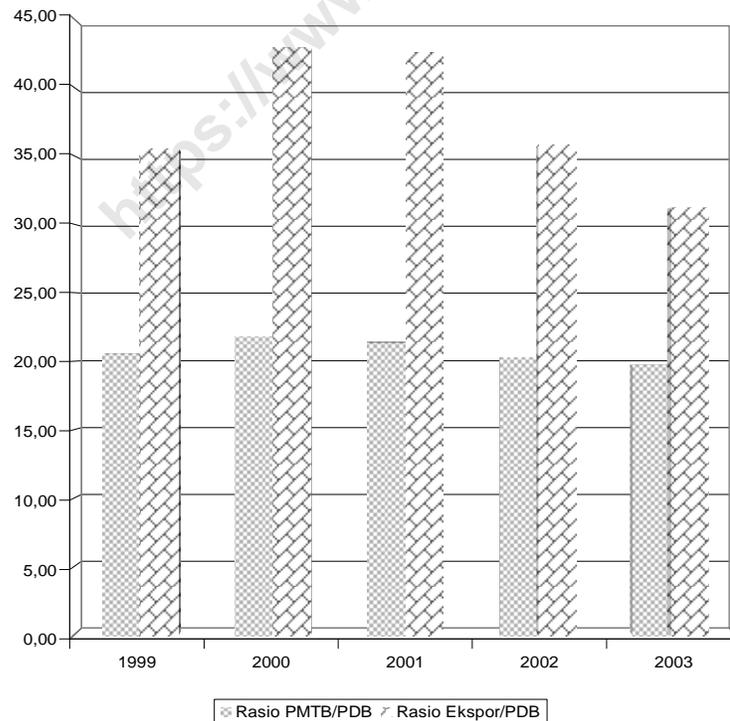
Uraian	1999	2000	2001	2002	2003	1999-2003
Rasio PMTB/PDB	20,55	21,81	21,40	20,25	19,72	20,75
Rasio Ekspor/PDB	35,51	42,93	42,54	35,83	31,24	37,61
Rasio PMTB/Ekspor	57,87	50,81	50,30	56,52	63,14	55,73
ICOR	-4,77	2,93	1,46	0,05	0,30	0,12

(Rasio dihitung dari Harga Berlaku; ICOR dari Harga Konstan 1993)

## 2.6. Keterkaitan Ekspor dengan PDB

Keterkaitan ekspor dengan PDB dicerminkan dengan rasio ekspor terhadap PDB yang menjelaskan besarnya peranan ekspor terhadap PDB. Rasio ini dari tahun 2000 mengalami peningkatan dibanding tahun 1999 yaitu dari 35,51 persen (1999) menjadi 42,93 persen (2000); tetapi tiga tahun berikutnya mengalami penurunan yaitu menjadi 42,54 persen (2001), 35,83 persen (2002) dan 31,24 persen (2003) (lihat tabel 2.7 dan gambar 2.5 serta gambar 2.10). Hal ini mencerminkan porsi pembentukan PDB dari hasil ekspor cenderung semakin turun terutama dari tahun 2001 sampai tahun 2003.

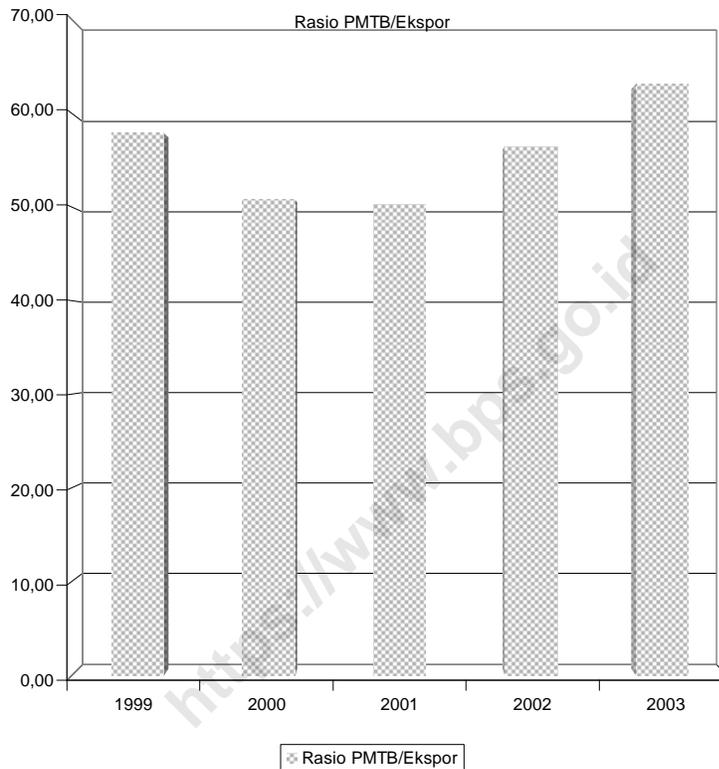
Gambar 2.10 Perbandingan Rasio PMTB dan Ekspor Terhadap PDB, 1999-2003



## 2.7. Keterkaitan PMTB dengan Ekspor

Rasio PMTB terhadap ekspor turun dari tahun 1999 hingga tahun 2001 dan naik pada tahun 2002 dan tahun 2003 (lihat gambar 2.11). Rasio ini mencerminkan besarnya pengeluaran PMTB terhadap ekspor. Semakin besar rasio ini berarti semakin besar pengeluaran PMTB untuk menghasilkan ekspor.

Gambar 2.11 Rasio PMTB/Ekspor, 1999-2003



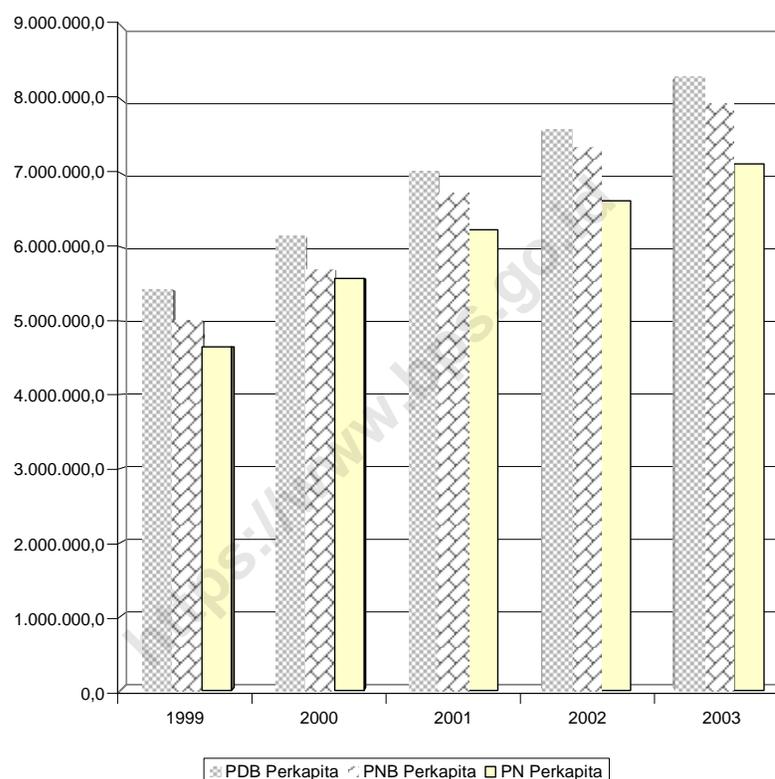
## 2.8. Produk Nasional Bruto dan Pendapatan Per Kapita

Walaupun judul pada bab ini lebih diarahkan kepada pembahasan PDB menurut penggunaan, namun informasi yang disajikan pada tabel-tabel lampiran menyangkut juga mengenai besarnya Produk Nasional Bruto (PNB), yang merupakan penjumlahan PDB dengan pendapatan neto faktor-faktor produksi dari luar negeri (*net factor income from abroad*). Sedangkan pendapatan nasional (*national income*), diperoleh dari hasil pengurangan PNB dengan pajak tidak langsung dan penyusutan. Yang dimaksud dengan pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional per kapita.

PDB atas dasar harga konstan 1993 selama tahun 1999 sampai tahun 2003 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,39 persen per tahun, sedangkan Produk Nasional Bruto (PNB) mengalami peningkatan yang lebih tinggi selama periode tersebut yaitu rata-rata sebesar 4,01 per

tahun. Pada tahun 2003 PDB atas dasar harga konstan 1993 berjumlah Rp 444.453,5 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 4,01 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2002 yang besarnya Rp 426.943,0 miliar. Pada sisi yang lain, PNB atas dasar harga konstan 1993 pada tahun 2003 sebesar Rp 423.883,1 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 4,73 persen dibanding tahun 2002 yang besarnya Rp 404.725,2 miliar.

Gambar 2.12 Perbandingan PDB Perkapita, PNB Perkapita dan PN Perkapita, 1999-2003 (Rupiah)



Perkembangan pendapatan per kapita dalam rupiah dari tahun 1999 hingga tahun 2003 menunjukkan gambaran yang terus meningkat, demikian pula dalam dolar Amerika pada tahun 1999 sampai tahun 2003 mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2001. PDB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 1999 sebesar Rp 5.421.911 (US\$ 687,9), dan pada tahun 2000 telah meningkat menjadi Rp 6.145.065 (US\$ 732,1). Sementara pada tahun 2001 PDB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp 7.025.600 (US\$ 686,2). PDB per kapita pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2002 besarnya Rp 7.596.897 (US\$ 811,1) dan tahun 2003 Rp 8.304.319 (US\$ 967,9). Selama lima tahun tersebut rata-rata PDB per kapita atas dasar harga berlaku dalam mata uang rupiah maupun US \$ mengalami

peningkatan. Rata-rata peningkatan dalam mata uang rupiah sebesar 11,80 persen per tahun, sedangkan dalam US\$ 15,87 persen per tahun. Pendapatan nasional per kapita atas dasar harga berlaku dalam mata uang rupiah menunjukkan kenaikan dari Rp 4.649.342 pada tahun 1999 menjadi Rp 7.122.674 pada tahun 2003, demikian pula dalam US\$ mengalami peningkatan yaitu US\$ 589,9 pada tahun 1999 menjadi US\$ 830,1 pada tahun 2003.

<https://www.bps.go.id>

**BAB III**  
**PERKEMBANGAN KOMPONEN-KOMPONEN PDB MENURUT PENGGUNAAN**  
**SECARA RINCI, 1999-2003**

**3.1 Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pengeluaran konsumsi rumahtangga sampai saat ini masih merupakan komponen terbesar dalam pembentukan PDB menurut penggunaan. Komponen pengeluaran konsumsi rumahtangga ini secara terbagi atas dua bagian yaitu pengeluaran konsumsi untuk komoditas makanan dan pengeluaran konsumsi untuk komoditas bukan makanan.

Selama tahun 1999 hingga tahun 2003 pengeluaran konsumsi rumahtangga untuk kelompok komoditas makanan persentase distribusinya selalu di atas separo dari pengeluaran konsumsi rumahtangga untuk komoditas bukan makanan. Pada tahun 1999 persentase pengeluaran konsumsi rumahtangga mencapai 61,10 persen, kemudian berturut-turut sebesar 57,79 persen, 59,27 persen, 58,98 persen, dan 56,350 persen untuk tahun 2000 , tahun 2001, tahun 2002, dan tahun 2003. Sebaliknya persentase pengeluaran konsumsi rumahtangga untuk komoditas bukan makanan dari tahun 1999 sampai tahun 2003 cenderung mengalami peningkatan (lihat table 3.1 dan gambar 3.1).

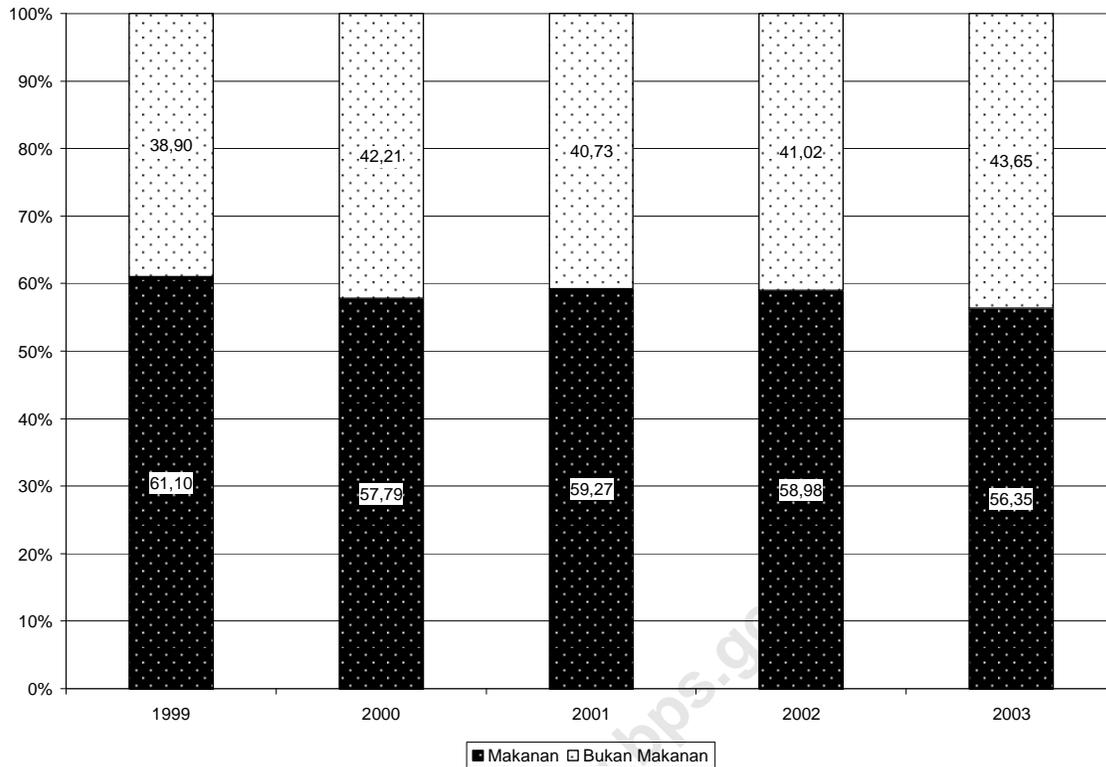
Tabel 3.1 Distribusi Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga Menurut Komoditas Atas Dasar Harga Berlaku, 1999-2003

Komoditas	1999	2000	2001	2002	2003
Makanan	61,10	57,79	59,27	58,98	56,35
Bukan Makanan	38,90	42,21	40,73	41,02	43,65
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga Menurut Komoditas Atas Dasar Harga Konstan 1993, 1999-2003 (Persen)

Komoditas	1999	2000	2001	2002	2003
Makanan	1,22	1,28	-0,68	0,47	2,15
Bukan Makanan	5,36	5,34	8,01	7,34	5,87
Total	3,06	3,13	3,36	3,81	4,02

Gambar 3.1 Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga Menurut Komoditas Atas Dasar Harga Berlaku, 1999-2003 (Persen)



Kebalikan dari pola distribusi, laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumahtangga untuk komoditas makanan ternyata lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumahtangga untuk komoditas bukan makanan (lihat table 3.2). Selama tahun 1999 hingga tahun 2003 rata-rata laju pertumbuhan konsumsi komoditas makanan sebesar 0,87 persen per tahun, sementara untuk komoditas bukan makanan sebesar 6,40 persen per tahun. Pada tahun 1999 laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumahtangga untuk komoditas makanan sebesar 1,22 dan pada tahun 2003 meningkat menjadi sebesar 2,15 persen. Sementara untuk komoditas bukan makanan pada tahun 1999 laju pertumbuhannya sebesar 5,36 persen dan tahun 2003 sebesar 5,87 persen.

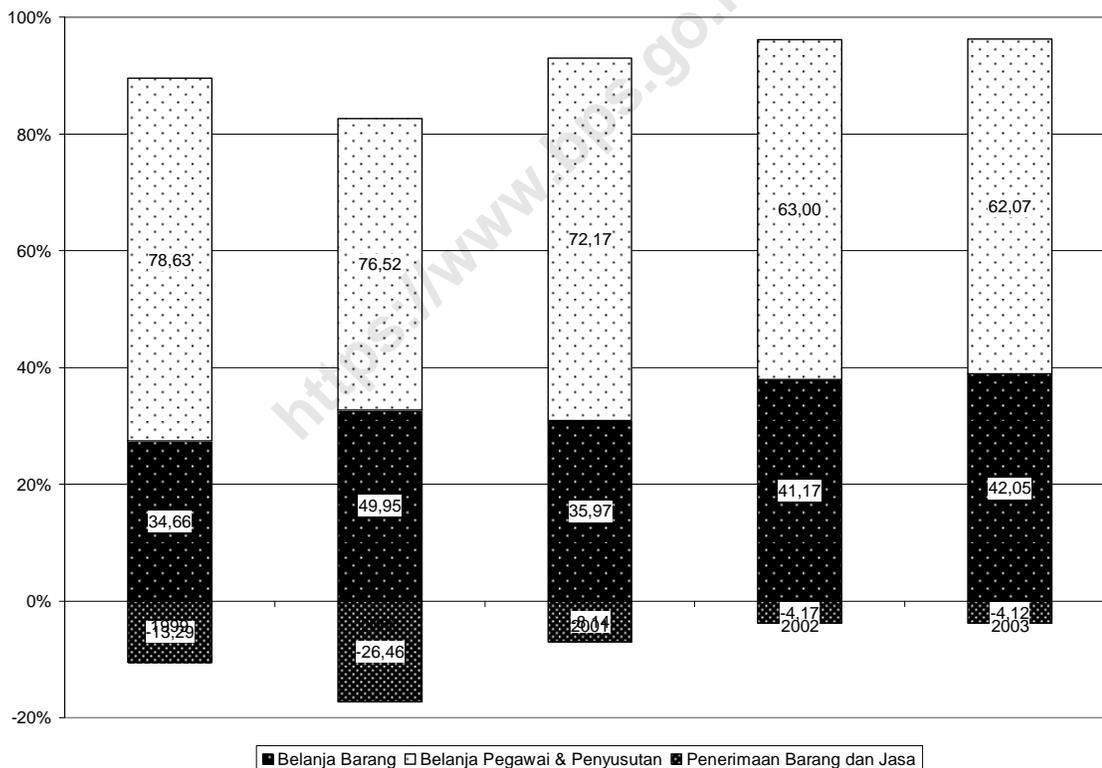
Dari pola distribusi dan laju pertumbuhan seperti tersebut di atas tampak bahwa ada perubahan pola pengeluaran konsumsi rumahtangga dari sekedar mengkonsumsi komoditas makanan ke komoditas bukan makanan. Hal ini mengindikasikan pula bahwa keperluan pengeluaran konsumsi rumahtangga pada komoditas makanan bukan lagi menjadi komponen yang utama tetapi telah mulai beralih ke komponen komoditas bukan makanan. Indikator tersebut dapat dilihat akhir-akhir ini dari semakin gencarnya promosi produk-produk bukan makanan terutama yang berasal dari luar negeri.

### 3.2 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah yang ada didalam PDB adalah akumulasi dari pengeluaran konsumsi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II dan pemerintah desa. Jumlah keseluruhan pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut dikenal sebagai pengeluaran konsumsi pemerintahan umum atau pengeluaran konsumsi pemerintah saja.

Pengeluaran konsumsi pemerintah sebenarnya merupakan butir penyeimbang dalam neraca produksi pemerintah. Komponen lainnya dari neraca produksi pemerintah tersebut adalah belanja barang, belanja pegawai, penyusutan, pajak tidak langsung dan penerimaan dari produksi barang dan jasa. Tabel 3.4 dan gambar 3.2 memperlihatkan distribusi komponen neraca produksi terhadap pengeluaran pemerintah.

Gambar 3.2 Persentase Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Menurut Komoditas Atas Dasar Harga Berlaku, 1999-2003 (Persen)



Tabel 3.4 Distribusi Persentase Komponen Neraca Produksi Terhadap Pengeluaran Pemerintah ADH Berlaku, 1999-2003

Rincian	1999	2000	2001	2002	2003
Belanja Barang	34,66	49,95	35,97	41,17	42,05
Belanja Pegawai + Penyusutan	78,63	76,52	72,17	63,00	62,07
Penerimaan Barang dan Jasa	-13,29	-26,46	-8,14	-4,17	-4,12
Jumlah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Komponen yang paling dominan dalam menentukan besarnya pengeluaran konsumsi pemerintah adalah belanja pegawai. Komponen belanja pegawai tersebut seperti yang disajikan pada tabel 3.4 digabungkan dengan nilai penyusutan. Untuk pemerintahan umum rata-rata persentase belanja pegawai terhadap pengeluaran konsumsi pemerintah sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 rata-rata sebesar 70,48 persen per tahun. Pada tahun 1999 peranan belanja pegawai dalam menentukan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 78,63 persen dan, pada tahun 2003 persentasenya turun menjadi 62,07 persen.

Belanja barang merupakan komponen kedua dari neraca produksi pemerintah yang sangat menentukan besarnya pengeluaran konsumsi pemerintah. Rata-rata persentase belanja barang terhadap pengeluaran konsumsi pemerintah sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 mencapai 40,76 persen per tahun. Pada tahun 1999 peranan belanja barang dalam menentukan pengeluaran konsumsi pemerintah berjumlah 34,66 persen, dan pada tahun 2003 persentasenya meningkat menjadi 42,05 persen

### 3.3 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau yang secara umum lebih dikenal dengan investasi fisik, adalah merupakan komponen pengeluaran PDB yang berkaitan erat dengan proses kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan produksi (output) dimasa yang akan datang.

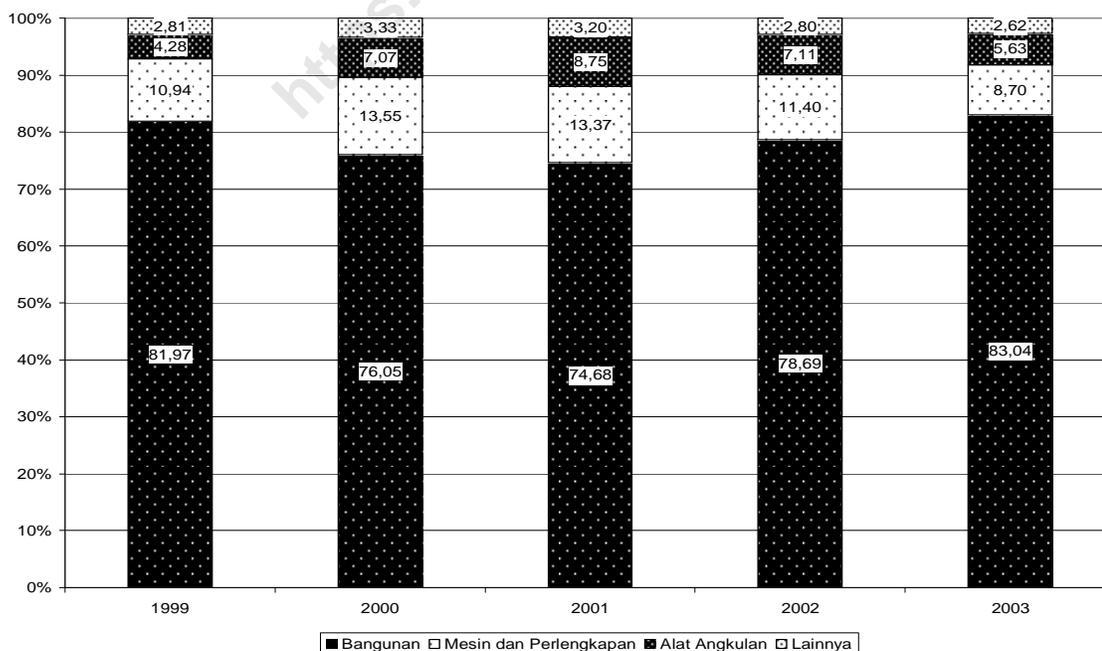
Komposisi PMTB menurut jenis barang modal yang terjadi selama tahun 1999-2003 dapat dilihat pada tabel 3.5. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jenis barang modal yang terbesar adalah komponen bangunan, kemudian berturut-turut disusul oleh jenis barang modal berupa mesin dan perlengkapan, alat angkutan dan lainnya. Urutan komposisi jenis barang modal ini tidak berubah hingga tahun 2003. Perubahan terjadi hanya pada besaran persentase untuk setiap jenis barang modal (lihat tabel 3.5 dan gambar 3.3).

Lebih jauh dari jenis modal berupa mesin dan perlengkapan, alat angkutan dan lainnya dapat dirinci ke dalam sumber perolehannya yaitu dari produksi dalam negeri dan dari luar negeri (impor). Selama tahun 1993 hingga tahun 2003 rata-rata persentase sumber perolehan barang modal yang berasal dari produksi dalam negeri hanya sebesar 26,06 persen pertahun, sementara barang modal yang berasal dari luar negeri persentasenya jauh lebih besar yaitu rata-rata sebesar 73,94 persen per tahun (lihat tabel 3.6).

Tabel 3.5 Distribusi Persentase Jenis Barang Modal Terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto ADH Berlaku, 1999-2003

Rincian Jenis Barang Modal	1999	2000	2001	2002	2003
Bangunan	81,97	76,05	74,68	78,69	83,04
Mesin dan Perlengkapan	10,94	13,55	13,37	11,40	8,70
Alat Angkutan	4,28	7,07	8,75	7,11	5,63
Lainnya	2,81	3,33	3,20	2,80	2,62
Jumlah PMTB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gambar 3.3 Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto Menurut Komoditas Atas Dasar Harga Berlaku, 1999-2003 (Persen)



Tabel 3.6 Distribusi Persentase Sumber Perolehan Barang ModalADH Berlaku, 1999-2003

Rincian	1999	2000	2001	2002	2003
Barang Modal Produksi Dalam Negeri	19,50	23,03	24,95	27,98	34,86
Barang Modal Produksi Luar Negeri (Impor)	80,50	76,97	75,05	72,02	65,14
Jumlah Barang Modal Selain Bangunan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Pertumbuhan PMTB per tahun untuk jenis barang modal berupa bangunan secara umum dan untuk jenis investasi selain bangunan, pola laju pertumbuhannya sangat berfluktuasi. Gambaran laju pertumbuhan tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7 Laju Pertumbuhan PMTB Menurut Jenis Barang Modal Atas Dasar Harga Konstan 1993, 1999-2003 (Persen)

Rincian	1999	2000	2001	2002	2003
Bangunan	1,01	2,60	4,42	4,85	6,70
Mesin dan Perlengkapan Dalam Negeri	-40,76	78,28	16,90	61,82	2,53
Mesin dan Perlengkapan Luar Negeri	-58,08	49,67	5,20	-12,31	-19,23
Alat Angkutan Dalam Negeri	-35,56	175,89	31,74	-11,43	10,16
Alat Angkutan Luar Negeri	-37,61	64,51	28,48	-16,96	-33,52
Lainnya Dalam Negeri	11,64	33,01	11,50	-14,04	2,53
Lainnya Luar Negeri	-55,76	53,32	-19,42	-4,78	-5,91
Jumlah PMTB	-16,37	14,18	6,50	0,21	1,36

Sejak tahun 1999 hingga tahun 2003 rata-rata laju pertumbuhan PMTB adalah sebesar 1,18 persen per tahun dimana porsi terbesar berasal dari barang modal berupa bangunan, sementara barang modal impor rata-rata laju pertumbuhannya menunjukkan angka yang negatif per tahunnya.

Laju pertumbuhan PMTB berupa mesin dan perlengkapannya, serta PMTB berupa alat angkutan, diduga mempunyai efek terhadap kinerja ekspor. Walaupun hal ini bukan satu-satunya faktor yang menentukan kinerja ekspor, tetapi mesin dan perlengkapannya serta alat angkutan, merupakan fungsi langsung terhadap produksi/ekspor.

### 3.4 Ekspor dan Impor Barang dan Jasa

#### a. Ekspor Barang dan Jasa

Gambaran ekspor untuk jenis komoditas barang dan jasa disajikan pada tabel 3.8. Dari gambar tersebut terlihat bahwa ekspor atas dasar harga berlaku baik komoditas barang maupun komoditas jasa meningkat dari tahun 1999 hingga tahun 2001 kemudian dua tahun berikutnya terjadi penurunan (lihat pula gambar 3.4). Pada tahun 2001 nilai ekspor yang terjadi mencapai Rp 624,3 triliun, dengan rincian ekspor barang sebesar Rp 569,2 triliun dan ekspor jasa sebesar Rp 55,2 triliun. Padahal pada tahun 1999 nilai total ekspor baru mencapai Rp 390,6 triliun, yang terdiri atas ekspor barang Rp 355,9 triliun dan ekspor jasa Rp 34,4 triliun. Pelonjakan nilai ekspor tersebut lebih disebabkan karena naiknya nilai tukar dolar Amerika (US\$) terhadap rupiah. Pada tahun 2003 nilai total ekspor menurun menjadi 558,1 triliun, seiring dengan menurunnya nilai tukar US\$ terhadap rupiah.

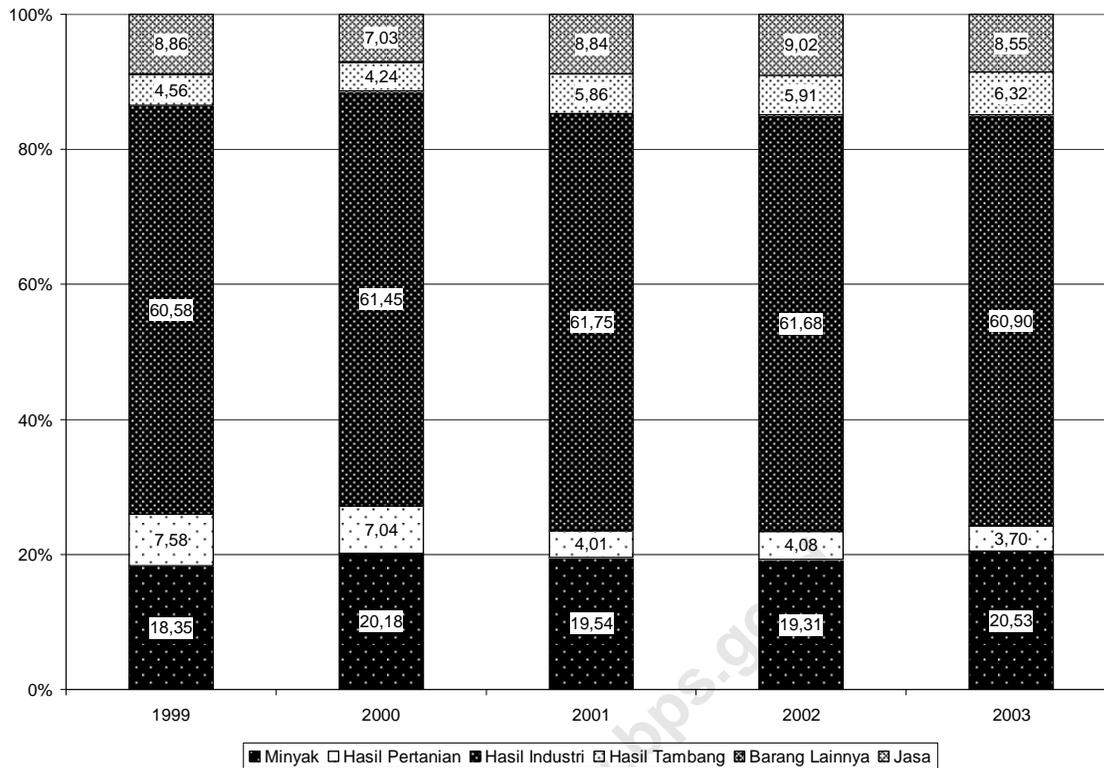
Tabel 3.8 Ekspor Barang dan Jasa ADH Berlaku, 1999-2003  
(Miliar Rupiah)

Rincian	1999	2000	2001	2002	2003
Barang	355.939,8	504.818,7	569.159,4	525.055,5	510.395,4
Jasa	34.620,3	38.173,7	55.181,4	52.026,0	47.696,0
Total Ekspor	390.560,1	542.992,4	624.340,8	577.081,5	558.091,4

Tabel 3.9 Distribusi Persentase Ekspor Barang dan Jasa, 1999-2003

Rincian	1999	2000	2001	2002	2003
Barang	32,37	39,91	38,78	32,60	28,57
a. Minyak	6,52	8,66	8,31	6,92	6,41
b. Hasil Pertanian	2,69	3,02	1,70	1,46	1,15
c. Hasil Industri	21,52	26,38	26,27	22,10	19,02
d. Hasil Tambang	1,62	1,82	2,49	2,12	1,97
e. Barang Lainnya	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
Jasa	3,15	3,02	3,76	3,23	2,67
Total Ekspor	35,51	42,93	42,54	35,83	31,24

Gambar 3.4 Persentase Ekspor Barang dan Jasa  
Menurut Komoditas Atas Dasar Harga Berlaku, 1999-2003 (Persen)



Tabel 3.10 Ekspor Barang dan Jasa ADH Konstan 1993, 1999-2003  
(Miliar Rupiah)

Rincian	1999	2000	2001	2002	2003
Barang	81.301,5	104.813,1	106.476,0	104.305,0	109.371,0
Jasa	10.562,1	11.380,5	13.124,2	14.615,0	14.353,0
Total Ekspor	91.863,6	116.193,6	119.600,2	118.920,0	123.724,0

Tabel 3.11 Laju Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa ADH Konstan 1993, 1999-2003  
(Persen)

Rincian	1999	2000	2001	2002	2003
Barang	-31,61	28,92	1,59	-2,04	4,86
Jasa	-33,25	7,75	15,32	11,36	-1,79
Total Ekspor	-31,80	26,48	2,93	-0,57	4,04

Bila dihitung atas dasar harga konstan 1993, pada tahun 2003 nilai ekspor Indonesia Rp 123,7 triliun, yang terdiri dari Rp 109,4 triliun ekspor barang dan Rp 14,4 triliun merupakan ekspor jasa. Dan apabila dibandingkan dengan tahun 2002, pertumbuhan total ekspor pada tahun 1999 mencapai -4,04 persen dimana pertumbuhan ekspor barang sebesar 4,86 persen dan pertumbuhan ekspor jasa sebesar -179. persen (lihat tabel 3.10 dan tabel 3.11).

#### b. Impor Barang dan Jasa

Seperti halnya pada kasus ekspor, impor atas dasar harga berlaku pada tahun 2003 juga mengalami penurunan. Perkembangan impor secara riil, nilainya dihitung berdasarkan harga konstan 1993.

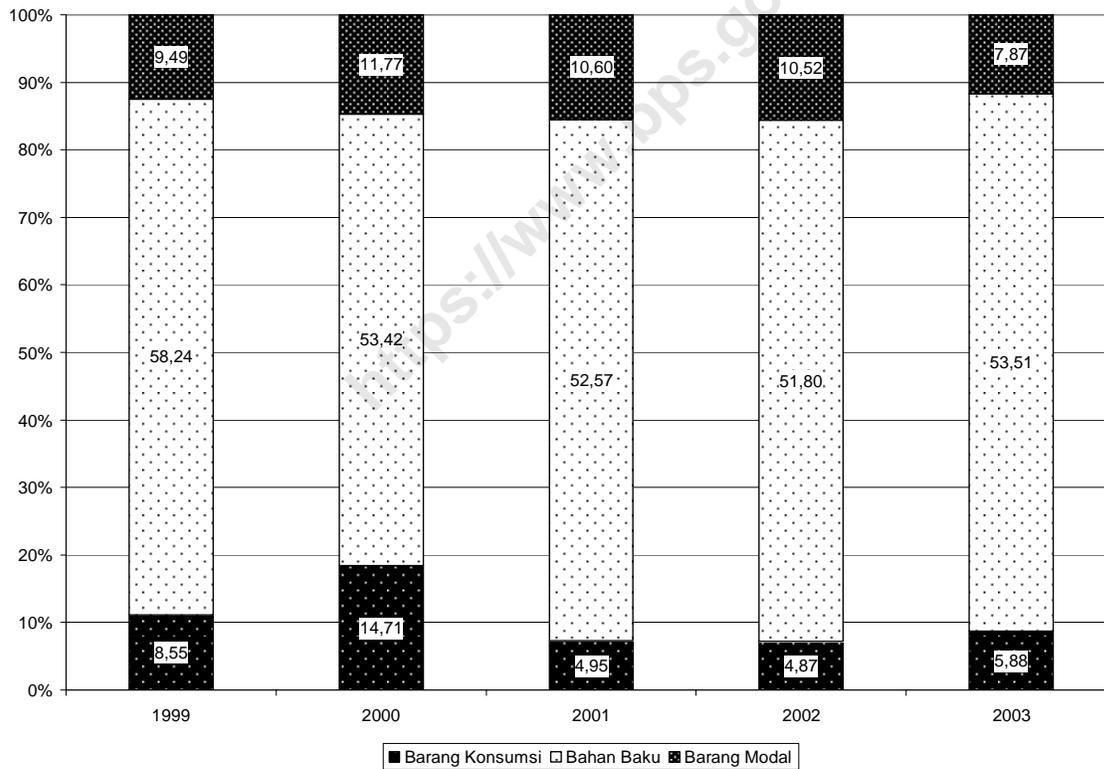
Tabel 3.12 Impor Barang dan Jasa ADH Berlaku, 1999-2003  
(Miliar Rupiah)

Rincian	1999	2000	2001	2002	2003
Barang	239.299,6	338.249,9	342.950,2	316.586,6	308.820,6
Jasa	74.420,6	85.068,0	160.532,1	154.601,8	150.275,9
Total Impor	313.720,2	423.317,9	503.482,3	471.188,4	459.096,5

Tabel 3.13 Distribusi Persentase Impor Barang dan Jasa, 1999-2003

Rincian	1999	2000	2001	2002	2003
Barang:	76,3	79,9	68,1	67,2	67,3
a. Barang Konsumsi	8,55	14,71	4,95	4,87	5,88
b. Bahan Baku	58,24	53,42	52,57	51,80	53,51
c. Barang Modal	9,49	11,77	10,60	10,52	7,87
Jasa	23,72	20,10	31,88	32,81	32,73
Total Impor	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gambar 3.5 Persentase Impor Barang dan Jasa Menurut Komoditas Atas Dasar Harga Berlaku, 1999-2003 (Persen)



Tabel 3.14 Impor Barang dan Jasa ADH Konstan 1993, 1999-2003  
(Miliar Rupiah)

Rincian	1999	2000	2001	2002	2003
Barang	58.164,9	72.986,1	66.821,5	63.606,8	66.173,8
Jasa	23.523,4	25.930,5	40.206,2	38.120,3	37.550,8
Total Impor	81.688,3	98.916,6	107.027,7	101.727,1	103.724,6

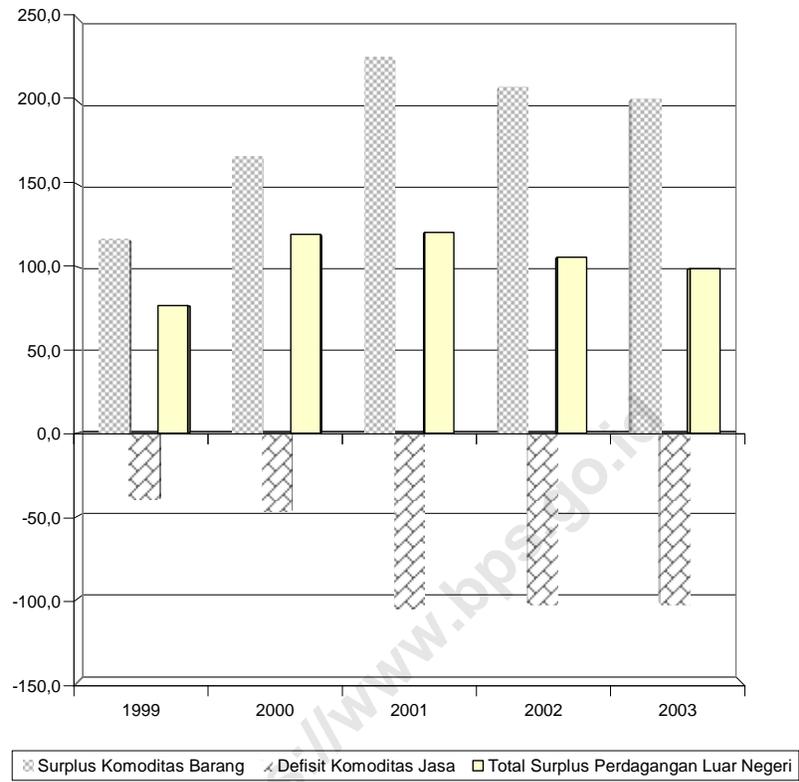
Tabel 3.15 Laju Pertumbuhan Impor Barang dan Jasa ADH Konstan 1993, 1999-2003  
(Persen)

Rincian	1999	2000	2001	2002	2003
Barang	-43,03	25,48	-8,45	-4,81	4,04
Jasa	-22,36	10,23	55,05	-5,19	-1,49
Total Impor	-38,30	21,09	8,20	-4,95	1,96

Pada tahun 2003, nilai total impor atas dasar berlaku sebesar Rp 459,1 triliun. Nilai tersebut menurun dibandingkan nilai impor tahun 2002 yang besarnya hanya Rp 471,2 triliun. Nilai impor total tahun 2003 tersebut terdiri atas impor barang Rp 308,8 triliun dan impor jasa Rp 150,3 triliun. Sebaliknya pada tahun 2003 tersebut apabila dihitung berdasarkan harga konstan 1993, total nilai impor terjadi kenaikan dimana impor barang naik dari Rp 63,6 triliun (tahun 2002) menjadi Rp 66,2 triliun (tahun 2003) dan impor jasa naik dari Rp 38,1 triliun (tahun 2002) menjadi Rp 37,6 triliun (tahun 2003). Dengan demikian, impor tahun 2003 apabila dihitung berdasarkan harga konstan 1993 nilainya meningkat dari Rp 101,7 triliun pada tahun 2002 menjadi Rp 103,7 triliun pada tahun 2003.

Dari gambaran kegiatan ekspor impor di atas (lihat kembali pula tabel 3.8 dan tabel 3.12 serta gambar 3.6), terlihat bahwa sejak tahun 1999 hingga tahun 2003 selalu terjadi surplus perdagangan barang dan jasa Indonesia terhadap luar negeri. Tahun 1999 surplus perdagangan luar negeri Indonesia sebesar Rp 76,8 triliun dengan rincian pada komoditas barang surplus Rp 116,8 triliun dan komoditas jasa defisit -Rp 39,8 triliun. Dan pada tahun 2003 posisi surplus perdagangan luar negeri Indonesia mencapai Rp 99,0 triliun dengan rincian pada komoditas barang surplus Rp 201,6 triliun dan komoditas jasa defisit -Rp 102,6 triliun.

Gambar 3.6 Perbandingan Surplus (Defisit) Perdagangan Luar negeri Indonesia 1999-2003 (Triliun Rupiah)



## **BAB IV KESIMPULAN**

Dari hasil-hasil sebagaimana disajikan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pasca krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997, perekonomian Indonesia selama tahun 1999 hingga tahun 2003 secara gradual mengalami peningkatan yang berarti menuju proses *recovery*. Keadaan tersebut dapat dilihat pada kondisi perekonomian tahun 2003 dimana level PDB atas dasar harga konstan sudah sedikit melampaui level PDB pada masa sebelum krisis. Namun demikian peningkatan yang cukup berarti dari perekonomian Indonesia tersebut baru digerakkan oleh pengeluaran untuk konsumsi. Hal tersebut dapat tercermin dari rata-rata perkembangan baik secara nominal maupun secara riil paling tinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah, yang kemudian diikuti oleh konsumsi rumah tangga. Sedangkan komponen PDB yang rata-rata perkembangan nominalnya paling kecil adalah impor barang dan jasa.

Lebih jauh penelusuran perkembangan perekonomian Indonesia dari sisi *demand* tersebut rata-rata secara nominal didominasi oleh komoditas pengeluaran belanja barang dari pemerintah kemudian diikuti oleh penerimaan barang dan jasa dari pemerintah selanjutnya dari permintaan komoditas alat angkutan. Sementara rata-rata perkembangan terlambat secara nominal berasal dari ekspor barang. Secara riil, rata-rata perkembangan komoditas tertinggi juga berasal dari pengeluaran belanja barang oleh pemerintah, selanjutnya adalah dari komoditas permintaan alat angkutan dan yang ketiga dari penerimaan barang dan jasa pemerintah. Dominasi pengeluaran konsumsi pemerintah sejak tahun 1999 hingga tahun 2003 tersebut dikarenakan banyaknya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah di dalam penyelenggaraan pemilu dan sidang umum tahun 1999 serta persiapan pemilihan umum tahun 2004.

## LAMPIRAN A

### KONSEP, DEFINISI DAN METODE ESTIMASI PDB MENURUT PENGGUNAAN

#### 1. Konsepsi Mengenai PDB Menurut Penggunaan

PDB menurut penggunaan disebut juga sebagai PDB menurut permintaan atau PDB menurut pengeluaran. Dilihat dari sisi permintaan PDB merupakan jumlah seluruh nilai akhir barang jadi dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama satu tahun (*output*). Yang dimaksud dengan barang jadi adalah barang yang tidak digunakan untuk diproses kembali oleh suatu industri, tetapi untuk dikonsumsi oleh penduduk. Barang setengah jadi (*intermediate goods*) tidak termasuk dalam penghitungan PDB, karena barang setengah jadi digunakan untuk diproses kembali menjadi barang jadi, sehingga nilai barang setengah jadi tersebut sudah termasuk di dalam barang jadi yang dihasilkan.

Sedangkan jika dilihat dari sisi pengeluaran, PDB merupakan jumlah seluruh pengeluaran (*expenditure*) yang dilakukan oleh seluruh institusi pada suatu negara selama satu tahun. Institusi tersebut yaitu: rumahtangga, perusahaan dan pemerintah. Sehingga secara umum PDB menurut penggunaan dibagi menjadi empat jenis pengeluaran yaitu: pengeluaran konsumsi rumahtangga, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor neto. Secara lengkap komponen-komponen PDB menurut penggunaan tersebut terdiri dari: pengeluaran konsumsi rumahtangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor neto (ekspor minus impor).

{Keterangan: Pendapatan atas faktor produksi merupakan pendapatan yang disebabkan oleh kepemilikan faktor-faktor produksi (modal, tenagakerja, dsb) oleh suatu negara. Faktor produksi tersebut bisa berada luar di wilayah negara tersebut. *Pendapatan neto atas faktor produksi terhadap luar negeri* merupakan selisih pendapatan atas faktor produksi yang berada di luar wilayah domestik yang dimiliki oleh Indonesia dikurangi dengan pendapatan atas faktor produksi yang berada di wilayah domestik yang dimiliki oleh luar negeri. Bila Produk Domestik Bruto ditambah dengan pendapatan neto atas faktor produksi terhadap luar negeri akan diperoleh Produk Nasional Bruto.

Pendapatan Nasional merupakan Produk Nasional Bruto dikurangi dengan pajak tidak langsung neto dan penyusutan. *Pajak tidak langsung neto* merupakan pajak tidak langsung dikurangi subsidi. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap barang dan jasa yang diproduksi oleh unit usaha. Secara tidak langsung pajak tersebut dibebankan kepada rumahangga yang membeli barang dan jasa tersebut. *Penyusutan* adalah berkurangnya nilai barang modal karena proses produksi.

Angka-angka produk domestik bruto per kapita, produk nasional bruto per kapita dan pendapatan nasional per kapita merupakan angka-angka produk domestik bruto, produk nasional

bruto dan pendapatan nasional setelah dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Jumlah penduduk pertengahan tahun itu sendiri merupakan jumlah penduduk awal tahun ditambah jumlah penduduk akhir tahun kemudian dibagi dengan dua. Kurs asing yang digunakan adalah kurs dolar Amerika terhadap rupiah. Angka kurs tersebut merupakan kurs tengah yaitu kurs ekspor tertimbang ditambah dengan kurs impor tertimbang kemudian dibagi dengan dua}.

Penghitungan PDB menurut penggunaan disajikan dalam dua bentuk yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 1993. Penghitungan atas dasar harga berlaku adalah penghitungan terhadap semua komponen PDB yang dinilai atas dasar harga pada masing-masing tahun. Sedangkan penghitungan atas dasar harga konstan 1993 adalah penghitungan terhadap semua komponen PDB yang dinilai berdasarkan harga pada tahun 1993.

Perkembangan PDB Indonesia dengan menggunakan harga berlaku menjelaskan perkembangan PDB Indonesia yang mencerminkan selain karena perkembangan agregat permintaan juga karena perkembangan harga-harga. Sedangkan dengan harga konstan, pengaruh kenaikan harga sudah dihilangkan dari perkembangan PDB, sehingga merupakan perkembangan riil dari PDB pada suatu (periode) tahun tertentu.

## **2. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga**

### **a. Konsep dan Definisi mengenai Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga**

Pengeluaran konsumsi rumahtangga terdiri dari semua pengeluaran atas pembelian barang dan jasa oleh rumahtangga dan lembaga swasta nirlaba dengan tujuan dikonsumsi, dikurangi dengan hasil penjualan neto dari barang bekas atau tidak terpakai untuk periode satu tahun. Rumahtangga yang dimaksud adalah rumahtangga yang berada pada wilayah domestik suatu negara, baik penduduk negara tersebut maupun penduduk negara lain yang sudah merupakan residen negara Indonesia. Penduduk negara lain dianggap sebagai residen Indonesia bila mereka telah tinggal di Indonesia lebih dari satu tahun, kecuali mereka yang termasuk korp diplomatik, staf kedutaan asing (tidak termasuk staf lokal), perwakilan negara-negara lain. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga swasta nirlaba yaitu lembaga swasta yang dalam kegiatannya tidak bertujuan mencari keuntungan.

Pengeluaran rumahtangga terdiri dari pengeluaran makanan seperti bahan makanan, minuman, rokok, tembakau dsb, dan pengeluaran untuk bukan makanan seperti barang tahan lama, pakaian, bahan bakar, jasa-jasa, dan sebagainya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut baik makanan maupun bukan makanan merupakan pengeluaran untuk konsumsi, tidak untuk keperluan usaha rumahtangga. Jika seandainya ada sebagian dari pengeluaran tersebut digunakan untuk keperluan usaha, maka nilai seluruh pengeluaran tersebut harus dikurangi dengan besarnya nilai yang digunakan untuk keperluan usaha tersebut.

Pengeluaran untuk pemeliharaan kesehatan, pendidikan, rekreasi, pengangkutan dan jasa-jasa lainnya termasuk dalam konsumsi rumahtangga. Pembelian rumah dan perbaikan besar untuk rumah tidak termasuk pengeluaran konsumsi, melainkan dimasukkan dalam pembentukan modal, tetapi pengeluaran atas rumah yang ditempati seperti sewa rumah, perbaikan ringan, rekening air, listrik, telepon, dan lain-lain termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumahtangga.

## **b. Metode Penghitungan dan Sumber Data**

Karena keterbatasan data yang tersedia, maka untuk memperkirakan besarnya pengeluaran konsumsi rumahtangga digunakan dua macam metode estimasi, yaitu metode langsung dan metode penilaian harga eceran.

Metode langsung digunakan untuk memperoleh nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga secara keseluruhan. Data pokok yang digunakan adalah data Susenas, berupa nilai konsumsi perkapita seminggu untuk kelompok makanan dan nilai konsumsi perkapita sebulan untuk kelompok bukan makanan. Data tersebut berdasarkan harga berlaku. Kemudian dari data Susenas tersebut dibuat perkiraan nilai pengeluaran rumahtangga selama satu tahun. Nilai pengeluaran tersebut kemudian dideflasi dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk mendapatkan nilai pengeluaran rumahtangga berdasarkan harga konstan 1993.

Metode penilaian harga eceran digunakan untuk melengkapi kekurangan pada metode langsung. Metode ini dipakai apabila informasi yang tersedia hanya konsumsi rumahtangga dalam bentuk kuantum. Nilai konsumsi rumahtangga dapat diperoleh dengan jalan mengalikan kuantum dengan harga eceran untuk setiap jenis barang.

Perkiraan untuk pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh lembaga swasta nirlaba diperoleh dari rata-rata pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba setiap propinsi di Indonesia. Angka tersebut diperoleh dari publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

## **3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah**

### **a. Konsep dan Definisi mengenai Pengeluaran Konsumsi Pemerintah**

Pemerintah sebagai konsumen akhir mencakup departemen, lembaga bukan departemen, pemerintah daerah tingkat I, tingkat II dan pemerintah desa. Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang (termasuk biaya perjalanan, pemeliharaan dan pengeluaran lain yang bersifat rutin), tidak termasuk penerimaan dari barang dan jasa yang dihasilkan.

Data dasar yang dipakai adalah realisasi belanja rutin dan pembangunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan untuk pemerintah pusat. Sedangkan data pengeluaran pemerintah (daerah

tingkat I, II dan) desa diperoleh dari Survei Keuangan Daerah Tingkat I, II dan desa, BPS.

**Pengeluaran untuk belanja barang;** yaitu pengeluaran untuk pembelian barang-barang yang tidak tahan lama, artinya habis dipakai dalam proses produksi baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Data diperoleh dari belanja rutin pemerintah ditambah belanja pembangunan yang dipindahkan menjadi pengeluaran rutin karena pengeluaran tersebut menyangkut pengeluaran rutin, seperti pengeluaran pembangunan untuk hankam, proyek pendidikan, dan lain-lain.

**Pengeluaran untuk belanja pegawai;** yaitu pengeluaran pemerintah untuk pembayaran:

- Upah dan gaji dalam bentuk uang dan barang beserta tunjangannya
- Iuran dan jaminan sosial
- Iuran dana pensiun
- Asuransi kecelakaan, tabungan hari tua, dan sejenisnya

Data diperoleh dari belanja rutin pemerintah ditambah perkiraan upah dari belanja pembangunan.

**Penyusutan barang modal;** yaitu penyisihan pendapatan yang akan digunakan untuk pembelian barang modal baru, karena barang modal yang lama pada suatu saat sudah tidak dipakai lagi. Angka penyusutan ini diperkirakan sebesar 5% dari total belanja pegawai.

**Pajak tidak langsung;** yaitu pajak yang dibayar oleh pemerintah atas kegiatan pada sektor real estate dan pajak atas komoditas yang diproduksi. Data pajak yang dibayar pemerintah sampai sekarang belum tersedia, sehingga perinciannya masih kosong.

**Penerimaan dari jasa;** yaitu penerimaan dari kegiatan jasa yang disediakan untuk masyarakat. Rincian penerimaan dari jasa adalah sebagai berikut:

- Penerimaan pendidikan
- Penerimaan dari rumahsakit dan instansi kesehatan lainnya
- Penjualan karcis dan biaya masuk ke tempat hiburan yang diusahakan oleh pemerintah
- Penerimaan jasa tenagakerja dan pekerjaan
- Penerimaan proyek-proyek
- 50 persen dari sewa, penggantian benda-benda tidak bergerak dan benda-benda bergerak
- 50 persen dari penerimaan bukan pajak luar negeri
- 40 persen dari penerimaan lain-lain pada penerimaan bukan pajak pemerintah pusat.

**Penerimaan produksi berupa barang;** yaitu penjualan dari barang-barang yang diproduksi oleh semua unit pemerintahan umum. Rincian penerimaan produksi barang sebagai berikut:

- Penjualan hasil pertanian/perkebunan
- Penjualan hasil peternakan
- Penjualan hasil perikanan
- Penjualan hasil obat-obatan, vaksinasi, dan hasil farmasi lainnya

- Penerimaan penggantian dokumen pelanggan
- Penjualan penerbitan, potret, film, poster, gambar dan peta
- Penerimaan hasil penjualan air minum dari proyek pembangunan
- 50 persen dari sewa, penggantian benda-benda tidak bergerak dan benda-benda bergerak
- 20 persen dari penerimaan lain-lain pada penerimaan bukan pajak pemerintah pusat

Data pemerintah pusat diperoleh dari perincian penerimaan bukan pajak (APBN). Sedangkan data penerimaan pemerintah daerah diperoleh dari penerimaan produksi barang dan jasa, (Statistik Keuangan Pemerintah Daerah/Tingkat I dan Tingkat II, BPS).

### **Penghitungan Harga Konstan**

- i. Belanja barang menggunakan indeks harga perdagangan besar (IHPB) tanpa ekspor sebagai deflator, yaitu:

$$\frac{\text{nilai belanja barang atas dasar harga berlaku}}{\text{IHPB (tanpa ekspor)}}$$

- ii. Belanja pegawai menggunakan indeks jumlah pegawai negeri sipil sebagai ekstrapolator, yaitu:

$$\text{nilai belanja pegawai} \times \text{indeks tsb}$$

- iii. Penyusutan diperoleh 5 persen dari nilai belanja pegawai harga konstan
- iv. Penerimaan jasa & penerimaan barang diperoleh dari persentase penerimaan jasa & barang terhadap total neraca produksi atas dasar harga berlaku. Nilai persentase ini (sebagai ekstrapolator) dikalikan dengan total neraca produksi atas dasar harga konstan (i+ii+iii).
- v. Konsumsi pemerintah sebagai residual, yaitu (i+ii+iii)-iv

## **4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)**

### **a. Konsep dan Definisi mengenai PMTB**

Pembentukan modal tetap bruto adalah pembelian barang-barang modal baru dari dalam negeri dan pembelian barang-barang modal bekas/baru dari luar negeri yang terjadi pada suatu tahun tertentu, dikurangi penjualan barang modal bekas, termasuk juga pengadaan atau pembuatan barang modal serta perbaikan-perbaikan besar yang menyebabkan bertambahnya umur pemakaian atau bertambahnya kapasitas produksi. Pembentukan modal disini termasuk

margin perdagangan dan biaya pengangkutan, biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pemindahan hak milik dalam transaksi jual beli dari barang-barang modal.

Pembentukan modal tetap domestik bruto dirinci atas komponen-komponen barang modal yaitu bangunan, mesin dan perlengkapan, angkutan dan lainnya. Untuk komponen perubahan stok rinciannya tidak ada, karena selain data perubahan stok pada penyusunan PDB menurut penggunaan merupakan residual, juga data penunjangnya belum cukup tersedia. Barang modal adalah barang atau alat-alat yang digunakan untuk proses produksi dengan umur pemakaian satu tahun atau lebih serta mempunyai nilai relatif besar.

## **b. Ruang Lingkup dan Metode Estimasi**

Pembentukan modal tetap bruto dapat dibedakan atas :

- i. Pembentukan modal dalam bentuk bangunan/konstruksi
- ii. Pembentukan modal dalam bentuk mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan

Metode yang dipakai dalam penghitungan pembentukan modal tetap bruto adalah pendekatan arus barang (*commodity flow approach*). Penghitungan pembentukan modal dalam bentuk mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan dibedakan atas yang berasal dari impor dan yang berasal dari produksi dalam negeri.

Estimasi pembentukan modal dalam bentuk bangunan/konstruksi baik nilai atas dasar harga berlaku maupun nilai atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan rasio sebesar 0,9157 dari output sektor konstruksi yang merupakan pembentukan modal. Sedangkan sisanya (0,0843) yang merupakan perbaikan ringan bangunan/konstruksi dianggap bukan merupakan pembentukan modal.

Untuk estimasi penghitungan pembentukan modal berupa mesin-mesin dan alat perlengkapan dari produksi dalam negeri atas dasar harga konstan dihitung dengan cara ekstrapolasi, yaitu dengan menggunakan indeks produksi tertimbang masing-masing jenis barang menurut klasifikasi 5 digit kode KLUI. Kemudian untuk mendapatkan nilai berlakunya, nilai konstan tersebut diinflasi dengan indeks harga perdagangan besar tertimbang (IHPB) yang sesuai.

Penghitungan pembentukan modal berupa mesin-mesin dan alat perlengkapan yang dari impor, nilai konstannya diperoleh dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakan indeks

kuantum barang impor.

Indeks tersebut dihitung dengan formula:

$$IQ_t = \frac{\sum Q_t P_o}{\sum Q_{t-1} P_o} \times 100\%$$

dimana  $Iq_t$  : Indeks kuantum tahun t  
 $Q_t$  : kuantum pada tahun t  
 $Q_{t-1}$  : Kuantum pada tahun t-1  
 $P_o$  : Harga per unit pada tahun 1993

Kemudian untuk memperoleh nilai atas dasar harga berlaku, dihitung dengan menginflasi nilai konstan dengan indeks harga perdagangan besar barang impor.

### c. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penghitungan pembentukan modal tetap bruto diperoleh dari:

- i. Bagian Neraca Industri dan Pertanian BPS, yaitu output bangunan/konstruksi baik menurut harga berlaku maupun atas dasar harga konstan
- ii. Bagian Statistik Industri Besar dan Sedang BPS, yaitu indeks produksi industri menurut 5 digit kode KLUI baik triwulanan maupun tahunan.
- iii. Bagian Statistik Harga Perdagangan Besar BPS, yaitu indeks harga perdagangan besar (IHPB).
- iv. Bagian Statistik Impor BPS, yaitu besarnya kuantum dan nilai barang impor menurut SITC.

## 5. Perubahan Stok

Data mengenai nilai perubahan stok dalam komponen penggunaan PDB ini masih merupakan perkiraan kasar, karena dihitung dari PDB hasil penjumlahan nilai tambah bruto sektoral dikurangi komponen permintaan akhir lainnya seperti pengeluaran konsumsi

rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto dan ekspor neto, Jadi, di dalam nilai perubahan stok tersebut masih terkandung selisih statistik (*statistical discrepancy*) yang terdapat pada sektor atau komponen lainnya.

## **6. Ekspor dan Impor Barang dan Jasa**

### **a. Konsep dan Definisi mengenai Ekspor dan Impor**

Ekspor dan Impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk Indonesia dengan penduduk negara lain. Termasuk juga dalam ekspor adalah pembelian langsung atas barang dan jasa di wilayah domestik oleh penduduk negara lain (seperti oleh turis). Begitupun sebaliknya pembelian langsung barang dan jasa di luar negeri oleh penduduk Indonesia merupakan impor.

### **b. Ruang Lingkup dan Metode Estimasi**

Untuk ekspor dan impor barang dibedakan dalam dua jenis barang yaitu : minyak dan bukan minyak. Ekspor dan impor jasa meliputi : jasa pengangkutan, jasa asuransi, jasa komunikasi, pariwisata, pemerintahan dan jasa lainnya.

Ekspor barang dinilai menurut harga *Free on Board* (FOB), sedangkan impor menurut *Cost Insurance Freight* (CIF). Baik ekspor maupun impor nilai yang diperoleh masih dalam satuan kurs \$ AS, sehingga perlu dikonversikan ke dalam satuan rupiah. Untuk ekspor konversinya menggunakan rata-rata kurs beli \$ AS yang ditimbang dengan nilai nominal transaksi ekspor bulanan. Sedangkan impor konversinya menggunakan rata-rata kurs jual \$ AS yang ditimbang dengan nilai nominal transaksi impor bulanan. Hasil estimasi ekspor/impor barang dan jasa yang telah dikonversikan dalam satuan rupiah tersebut, merupakan nilai atas dasar harga berlaku.

Untuk mendapatkan nilai atas dasar harga konstannya diperoleh dengan cara mendeflate nilai berlakunya dengan indeks harga perunit (IHPU) masing-masing ekspor maupun impor.

### **c. Sumber Data**

Data yang dipakai untuk mengestimasi nilai ekspor dan impor selain bersumber dari

BPS, juga dari Bank Indonesia (BI). Nilai ekspor dan impor barang yang diperoleh dari BI berbeda dengan angka dari BPS, hal ini disebabkan perbedaan pencatatan antara BPS dan BI. Pencatatan nilai impor oleh BPS hanya bersumber dari dokumen PPUD, sedangkan pencatatan oleh BI bersumber dari Neraca Pembayaran (BOP). Jadi impor yang dilakukan dengan tidak menggunakan dokumen PPUD tidak tercatat oleh BPS. Sehingga untuk impor barang, data yang diperoleh dari BPS cakupannya diperkirakan masih *underestimate* bila dibandingkan dari data yang diperoleh dari BI.

Untuk nilai ekspor barang, angka yang diperoleh dari BPS dianggap lebih baik karena angka ekspor yang dicatat oleh BI berdasarkan pada transaksi finansialnya saja, walaupun barangnya belum diekspor. Jadi, data yang bersumber dari BPS hanya angka ekspor barang, sedangkan ekspor jasa, impor barang dan impor jasa bersumber dari BI.

## **7. Pendapatan Neto dari Luar Negeri atas Faktor Produksi**

Satu konsep yang tidak berkaitan dengan PDB tetapi berkaitan dengan Produk Nasional Bruto (PNB) adalah pendapatan neto dari luar negeri atas faktor produksi Indonesia. Karena dalam publikasi ini, walaupun diberi judul PDB menurut penggunaan, namun informasi mengenai PNB terutama yang berkaitan dengan ukuran per kapita juga disajikan, maka konsep dan definisi mengenai pendapatan neto dari luar negeri atas faktor produksi disajikan juga disini.

### **a. Konsep dan Definisi mengenai Pendapatan Neto dari Luar Negeri atas Faktor Produksi**

Pendapatan neto disini hanya mencakup pendapatan atas modal dan bunga neto yang diturunkan dari neraca pembayaran (BOP) Indonesia. Pendapatan neto yang dimaksud adalah selisih antara pendapatan yang mengalir masuk dari luar negeri dengan pendapatan yang mengalir ke luar negeri.

### **b. Ruang Lingkup dan Metode Estimasi**

Pendapatan neto dari faktor produksi mencakup antara lain : pendapatan atas investasi langsung dan atas investasi lainnya, pendapatan atau balas jasa terhadap tenagakerja dan

pendapatan dari harta kepemilikan.

Nilai estimasi pendapatan neto terhadap luar negeri atas faktor produksi diperoleh dari neraca pembayaran yang bersumber dari BI. Data asal yang diperoleh masih dalam nilai \$ AS, sehingga harus dikonversikan ke dalam nilai rupiah dengan menggunakan kurs ekspor dan impor rata-rata tertimbang. Untuk pendapatan faktor produksi yang berasal dari luar negeri dikonversi dengan menggunakan kurs ekspor dan untuk pendapatan faktor produksi ke luar negeri dikonversikan dengan menggunakan kurs impor. Nilai hasil estimasi tersebut adalah berdasarkan atas dasar harga berlaku. Perkiraan atas dasar harga konstan dilakukan dengan cara deflasi, yaitu dengan menggunakan indeks harga perunit impor dan ekspor masing-masing sebagai deflatornya.

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

**LAMPIRAN B**  
**BEBERAPA PENJELASAN MENGENAI INVESTASI**  
**(PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO)**

Berdasarkan buku panduan mengenai penyusunan neraca nasional yang disebut *System of National Accounts* atau SNA yang diterbitkan oleh *United Nations*, besarnya investasi yang telah direalisasi di suatu negara pada suatu tahun adalah sama dengan jumlah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB atau *gross fixed capital formation*) dengan Perubahan Stok (PS atau *changes in stock*). PMTB menggambarkan investasi domestik secara fisik (*physical domestic investment*) yang telah direalisasi pada suatu tahun tertentu dalam bentuk berbagai jenis barang kapital/modal (*capital goods*), seperti bangunan, mesin-mesin, alat-alat transportasi, dan PMTB lainnya; sedangkan stok (*inventory*) menggambarkan output suatu sektor yang belum selesai diproses, yang dapat berbentuk output setengah jadi, atau input yang belum digunakan, termasuk juga stok berupa barang jadi yang belum dijual. *Inventory* atau stok termasuk sebagai bagian dari investasi karena stok termasuk dalam modal kerja (*working capital*) yang merupakan bagian dari investasi yang direncanakan. Perubahan stok merupakan selisih antara stok awal dengan stok akhir pada suatu waktu tertentu. Pendekatan penghitungan investasi melalui konsepsi PMTB dan PS disebut juga sebagai pendekatan arus barang (*commodity flow approach*) atau metode tidak langsung (*indirect method*). Pembahasan investasi pada publikasi ini difokuskan hanya terhadap perkembangan PMTB.

Secara lebih konseptual, PMTB atau *gross fixed capital formation* didefinisikan sebagai pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal (*capital goods*) baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri di dalam negeri (domestik). Barang modal adalah barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi dan mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih (oleh karena itu disebut sebagai modal tetap; sedangkan bruto mencerminkan bahwa penghitungan PMTB belum dikurangi dengan penyusutan barang modal). Secara lebih rinci, PMTB pada dasarnya meliputi:

- a. Barang modal dalam bentuk konstruksi, baik berupa bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, konstruksi lainnya seperti jalan raya, jembatan, instalasi listrik, jaringan komunikasi, bendungan irigasi, pelabuhan, dsb;

- b. Barang modal dalam bentuk mesin dan peralatan baik untuk keperluan pabrik, kantor, maupun untuk usaha rumahtangga;
- c. Barang modal berupa alat transportasi (kendaraan);
- d. Biaya yang dikeluarkan untuk perubahan dan perbaikan besar barang modal seperti disebutkan di atas yang dapat meningkatkan produktivitas atau memperpanjang umur pemakaian barang modal tersebut;
- e. Pengeluaran untuk pengembangan dan pembukaan lahan baru, pematangan tanah (lahan), perluasan hutan, penghutanan kembali serta penanaman dan peremajaan pohon tanaman hias;
- f. Pembelian ternak produktif untuk keperluan pembiakan, pemerahan susu, pengangkutan, dsb tetapi tidak termasuk pembelian ternak untuk dipotong atau untuk dikonsumsi.

### **1. PMTB Menurut Jenisnya (Jenis Barang Modal)**

PMTB dapat dirinci menurut jenisnya (dirinci atas jenis-jenis barang modal) yang dalam hal ini terdiri atas:

- a. Bangunan tempat tinggal. Yang termasuk dalam kategori ini adalah bangunan tempat tinggal yang dibangun sendiri oleh pemiliknya (rumahtangga) termasuk didalamnya perbaikan-perbaikan besar terhadap bangunan tempat tinggal; atau yang dibangun oleh pihak pengembang (*developer*) sektor properti atau *real estate* (termasuk oleh Perumnas/BTN) yang telah dibeli oleh konsumen (rumahtangga);
- b. Bangunan bukan tempat tinggal. Yang termasuk dalam kategori ini adalah bangunan bukan tempat tinggal seperti gedung-gedung perkantoran; tetapi termasuk juga bangunan tempat tinggal yang dibangun oleh pihak pengembang sektor properti (*real estate* dan Perumnas/BTN) tetapi belum terjual kepada konsumen;
- c. Bangunan lainnya. Dalam kategori ini termasuk bangunan lainnya, seperti jalan raya, jembatan, instalasi listrik, jaringan komunikasi, bendungan irigasi, pelabuhan, dsb;
- d. Mesin-mesin (untuk keperluan kantor seperti komputer, mesin tik, dsb; atau untuk keperluan pabrik seperti mesin tenun, dsb);
- e. Alat transportasi (kendaraan) untuk keperluan produksi (alat kendaraan yang digunakan

untuk konsumsi, seperti untuk keperluan keluarga, tidak termasuk sebagai barang modal);

- f. PMTB lainnya seperti pematangan lahan, pembelian ternak produktif, perluasan dan peremajaan hutan, dsb.

## **2. PMTB Menurut Institusi**

Besarnya PMTB dapat juga dirinci menurut institusi yang melakukan investasi. Dalam hal ini, dengan menggunakan *owner concept*, institusi yang melakukan investasi dirinci atas:

- a. Pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah di sini adalah pemerintah yang menyelenggarakan *general administration*, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar sesuai dengan konsep pemerintah dalam PDB Indonesia yang hanya mencakup pemerintah dalam tugas *general administration* saja. Pengeluaran PMTB oleh pemerintah, misalnya, untuk pembangunan gedung kantor, pembelian mesin-mesin, komputer untuk penyelenggaraan tugas pemerintah sebagai *general administration*. Termasuk juga bila pemerintah mengeluarkan PMTB untuk kepentingan masyarakat yang bersifat infrastruktur, seperti pembangunan jalan raya, pembangunan irigasi, dsb.
- b. Badan Usaha Milik Nasional (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam kategori ini hanya pengeluaran investasi yang benar-benar dikuasai oleh BUMN dan BUMD tetapi tidak termasuk pengeluaran PMTB oleh pemerintah yang bersifat infrastruktur untuk kepentingan masyarakat (jalan raya, irigasi, kesehatan, pendidikan);
- c. Swasta dan rumah tangga (dalam bagian ini PMTB yang dikuasai oleh swasta dan rumah tangga digabung menjadi satu kelompok karena informasi mengenai pengeluaran PMTB oleh rumah tangga tidak dapat diperoleh).

## **3. PMTB Menurut Lapangan Usaha**

PMTB dirinci atas 8 lapangan usaha utama ekonomi, yaitu:

- a. Pertanian;
- b. Pertambangan dan Penggalian;
- c. Industri tanpa Migas;

- d. Industri Migas;
- e. Listrik, Gas, dan Air Minum;
- f. Konstruksi (Bangunan);
- g. Pemerintahan Umum;
- h. Jasa-Jasa.

Yang perlu dijelaskan dalam klasifikasi lapangan usaha ini adalah mengenai perlakuan terhadap lapangan usaha pemerintahan umum. Seperti pernah dijelaskan sebelumnya, yang dimaksud dengan lapangan usaha pemerintahan umum adalah lapangan usaha pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan umum (*general administration*), baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini dilakukan sesuai dengan konsep pemerintahan umum dalam PDB Indonesia yang hanya mencakup pemerintah dalam tugas *general administration* saja. Sehingga, dalam klasifikasi ini, sesuai dengan *owner concept*, yang termasuk dalam pengeluaran PMTB oleh lapangan usaha pemerintahan umum, misalnya, adalah untuk pembangunan gedung kantor, pembelian mesin-mesin tik, komputer untuk penyelenggaraan tugas pemerintah sebagai *general administration*. Selain dari itu bila pemerintah mengeluarkan PMTB untuk kepentingan masyarakat yang bersifat infrastruktur, seperti pembangunan jalan raya, pembangunan irigasi, dsb, maka pengeluaran investasi tersebut dimasukkan ke dalam pengeluaran PMTB oleh lapangan usaha pemerintahan umum.

Yang dimaksud dengan lapangan usaha konstruksi adalah lapangan usaha yang melakukan kegiatan pembangunan konstruksi yang dilakukan oleh masing-masing sektor (pertanian, industri, dsb) yang membangun bangunan bukan tempat tinggal, seperti untuk kantor, atau membangun bangunan lainnya (jalan raya, pelabuhan, dsb) tetapi bangunan-bangunan tersebut belum selesai dan belum digunakan oleh masing-masing sektor. Termasuk dalam lapangan usaha konstruksi adalah rumah tangga yang membangun bangunan tempat tinggal untuk ditempati sendiri (sudah selesai atau belum selesai dibangun; dibangun sendiri atau melalui para pengembang atau *developer* properti) dan perumahan (tempat tinggal) yang belum terjual kepada konsumen.

<https://www.bps.go.id>

## **TABEL-TABEL**

TABEL 17. PENGGUNAAN PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT KOMODITAS  
(MILIAR RUPIAH)

JENIS PENGELUARAN	1999	2000	2001	2002*	2003**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	838,097.2	850,818.7	972,938.3	1,120,164.0	1,238,891.7
a. Makanan	512,049.4	491,686.1	576,657.5	660,690.1	698,125.1
b. Bukan Makanan	326,047.8	359,132.6	396,280.8	459,473.9	540,766.6
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (a+b-c)	72,631.3	90,779.7	113,416.1	132,218.7	163,701.3
a. Belanja Barang	25,170.9	45,344.2	40,800.6	54,432.5	68,840.9
b. Belanja Pegawai + Penyusutan (NTB)	57,110.8	69,460.2	81,850.9	83,293.4	101,605.6
c. Penerimaan Barang dan Jasa	9,650.4	24,024.7	9,235.4	5,507.2	6,745.2
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	226,015.8	275,881.3	314,065.8	326,165.2	352,360.5
a. Bangunan	185,262.5	209,804.4	234,541.5	256,673.4	292,615.8
b. Mesin dan Perlengkapan Dalam Negeri	891.7	1,625.4	1,996.2	3,364.8	3,448.8
c. Mesin dan Perlengkapan Luar Negeri	23,836.3	35,761.4	39,986.1	33,833.2	27,209.5
d. Alat Angkutan Dalam Negeri	2,518.8	7,272.4	10,352.7	9,246.8	10,260.0
e. Alat Angkutan Luar Negeri	7,146.3	12,244.3	17,125.4	13,929.2	9,578.1
f. Lainnya Dalam Negeri	4,535.0	6,317.8	7,496.3	6,835.3	7,117.6
g. Lainnya Luar Negeri	1,825.2	2,855.6	2,567.6	2,282.5	2,130.7
4. Perubahan Stok <sup>1</sup>	-113,852.6	-72,235.5	-53,623.9	-73,876.0	-67,257.5
5. Ekspor Barang dan Jasa	390,560.1	542,992.4	624,340.8	577,081.5	558,091.4
a. Minyak	71,683.4	109,567.1	122,011.8	111,439.7	114,560.9
b. Hasil Pertanian	29,618.0	38,245.6	25,007.7	23,518.6	20,625.9
c. Hasil Industri	236,607.8	333,684.0	385,507.3	355,936.7	339,893.0
d. Hasil Tambang	17,820.9	23,049.9	36,579.7	34,118.4	35,280.0
e. Barang Lainnya	209.7	272.1	52.9	42.1	35.6
f. Jasa	34,620.3	38,173.7	55,181.4	52,026.0	47,696.0
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	313,720.2	423,317.9	503,482.3	471,188.4	459,096.5
a. Barang Konsumsi	26,811.6	62,268.7	24,898.1	22,936.7	27,003.1
b. Bahan Baku	182,724.2	226,157.4	264,663.3	244,071.1	245,671.4
c. Barang Modal	29,763.8	49,823.8	53,388.8	49,578.8	36,146.1
d. Jasa	74,420.6	85,068.0	160,532.1	154,601.8	150,275.9
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO	1,099,731.6	1,264,918.7	1,467,654.8	1,610,565.0	1,786,690.9
8. Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri Atas Faktor Produksi (a-b)	-83,764.2	-92,161.8	-61,051.5	-54,513.0	-79,626.7
a. Pendapatan Dari Luar Negeri	13,882.9	14,773.4	19,449.9	10,242.0	16,700.2
b. Pendapatan Ke Luar Negeri	97,647.1	106,935.2	80,501.4	64,755.0	96,326.9
9. PRODUK NASIONAL BRUTO	1,015,967.4	1,172,756.9	1,406,603.3	1,556,052.0	1,707,064.2
10. Dikurangi Pajak Tidak Langsung Neto (a-b)	17,950.1	-37,820.3	31,425.7	71,186.4	85,272.2
a. Pajak Tidak Langsung	54,323.8	75,115.2	85,377.4	111,192.7	128,480.3
b. Subsidi	36,373.7	112,935.5	53,951.7	40,006.3	43,208.1
11. Dikurangi Penyusutan	54,986.6	63,245.9	73,382.7	80,528.3	89,334.5
12. PENDAPATAN NASIONAL	943,030.7	1,147,331.3	1,301,794.9	1,404,337.4	1,532,457.5

<sup>1</sup> Sisa

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

TABEL 18. PENGGUNAAN PDB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993 MENURUT KOMODITAS  
(MILIAR RUPIAH)

JENIS PENGELUARAN	1999	2000	2001	2002*	2003**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	267,989.1	276,377.2	285,674.7	296,559.3	308,477.4
a. Makanan	145,911.1	147,780.6	146,771.1	147,461.1	150,630.2
b. Bukan Makanan	122,078.0	128,596.6	138,903.6	149,098.2	157,847.2
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (a+b-c)	27,014.3	28,767.8	31,351.5	35,362.4	38,842.8
a. Belanja Barang	8,496.3	14,221.0	11,110.9	13,943.6	17,340.3
b. Belanja Pegawai + Penyusutan (NTB)	22,250.6	22,555.1	22,795.3	22,887.0	23,103.0
c. Penerimaan Barang dan Jasa	3,732.6	8,008.3	2,554.7	1,468.2	1,600.5
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	78,284.7	89,389.1	95,197.1	95,396.9	96,695.7
a. Bangunan	62,308.4	63,931.5	66,759.0	70,000.1	74,690.3
b. Mesin dan Perlengkapan Dalam Negeri	406.0	723.8	846.1	1,369.2	1,403.9
c. Mesin dan Perlengkapan Luar Negeri	9,339.1	13,977.4	14,704.2	12,894.6	10,415.3
d. Alat Angkutan Dalam Negeri	1,121.4	3,093.8	4,075.9	3,610.0	3,976.8
e. Alat Angkutan Luar Negeri	2,257.0	3,712.9	4,770.3	3,961.3	2,633.3
f. Lainnya Dalam Negeri	2,088.7	2,778.2	3,097.6	2,662.8	2,730.3
g. Lainnya Luar Negeri	764.1	1,171.5	944.0	898.9	845.8
4. Perubahan Stok <sup>1</sup>	-4,110.9	-13,794.2	-13,042.2	-17,568.5	-19,561.8
5. Ekspor Barang dan Jasa	91,863.6	116,193.6	119,600.2	118,920.0	123,724.0
a. Barang	81,301.5	104,813.1	106,476.0	104,305.0	109,371.0
b. Jasa	10,562.1	11,380.5	13,124.2	14,615.0	14,353.0
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	81,688.3	98,916.6	107,027.7	101,727.1	103,724.6
a. Barang	58,164.9	72,986.1	66,821.5	63,606.8	66,173.8
b. Jasa	23,523.4	25,930.5	40,206.2	38,120.3	37,550.8
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO	379,352.5	398,016.9	411,753.6	426,943.0	444,453.5
8. Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri Atas Faktor Produksi (a-b)	-22,145.1	-25,391.1	-17,399.1	-22,217.8	-20,570.4
a. Pendapatan Dari Luar Negeri	3,474.4	3,743.4	6,118.4	4,169.0	3,903.9
b. Pendapatan Ke Luar Negeri	25,619.5	29,134.5	23,517.5	26,386.8	24,474.3
9. PRODUK NASIONAL BRUTO	357,207.4	372,625.8	394,354.5	404,725.2	423,883.1
10. Dikurangi Pajak Tidak Langsung Neto	6,181.9	-11,746.1	8,865.6	18,925.5	21,238.3
11. Dikurangi Penyusutan	18,967.6	19,900.8	20,587.7	21,347.2	22,222.7
12. PENDAPATAN NASIONAL	332,057.9	364,471.1	364,901.3	364,452.5	380,422.1

<sup>1</sup> Sisa

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

TABEL 19. DISTRIBUSI PERSENTASE PENGGUNAAN PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU  
MENURUT KOMODITAS

JENIS PENGELUARAN	1999	2000	2001	2002*	2003**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	76.21	67.26	66.29	69.55	69.34
a. Makanan	46.56	38.87	39.29	41.02	39.07
b. Bukan Makanan	29.65	28.39	27.00	28.53	30.27
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (a+b-c)	6.60	7.18	7.73	8.21	9.16
a. Belanja Barang	2.29	3.58	2.78	3.38	3.85
b. Belanja Pegawai + Penyusutan (NTB)	5.19	5.49	5.58	5.17	5.69
c. Penerimaan Barang dan Jasa	0.88	1.90	0.63	0.34	0.38
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	20.55	21.81	21.40	20.25	19.72
a. Bangunan	16.85	16.59	15.98	15.94	16.38
b. Mesin dan Perlengkapan Dalam Negeri	0.08	0.13	0.14	0.21	0.19
c. Mesin dan Perlengkapan Luar Negeri	2.17	2.83	2.72	2.10	1.52
d. Alat Angkutan Dalam Negeri	0.23	0.57	0.71	0.57	0.57
e. Alat Angkutan Luar Negeri	0.65	0.97	1.17	0.86	0.54
f. Lainnya Dalam Negeri	0.41	0.50	0.51	0.42	0.40
g. Lainnya Luar Negeri	0.17	0.23	0.17	0.14	0.12
4. Perubahan Stok <sup>1</sup>	-10.35	-5.71	-3.65	-4.59	-3.76
5. Ekspor Barang dan Jasa	35.51	42.93	42.54	35.83	31.24
a. Minyak	6.52	8.66	8.31	6.92	6.41
b. Hasil Pertanian	2.69	3.02	1.70	1.46	1.15
c. Hasil Industri	21.52	26.38	26.27	22.10	19.02
d. Hasil Tambang	1.62	1.82	2.49	2.12	1.97
e. Barang Lainnya	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
f. Jasa	3.15	3.02	3.76	3.23	2.67
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	28.53	33.47	34.31	29.26	25.70
a. Barang Konsumsi	2.44	4.92	1.70	1.42	1.51
b. Bahan Baku	16.62	17.88	18.03	15.15	13.75
c. Barang Modal	2.71	3.94	3.64	3.08	2.02
d. Jasa	6.77	6.73	10.94	9.60	8.41
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

<sup>1</sup> Sisa

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

TABEL 20. DISTRIBUSI PERSENTASE PENGGUNAAN PDB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993  
MENURUT KOMODITAS

JENIS PENGELUARAN	1999	2000	2001	2002*	2003**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	70.64	69.44	69.38	69.46	69.41
a. Makanan	38.46	37.13	35.65	34.54	33.89
b. Bukan Makanan	32.18	32.31	33.73	34.92	35.51
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (a+b-c)	7.12	7.23	7.61	8.28	8.74
a. Belanja Barang	2.24	3.57	2.70	3.27	3.90
b. Belanja Pegawai + Penyusutan (NTB)	5.87	5.67	5.54	5.36	5.20
c. Penerimaan Barang dan Jasa	0.98	2.01	0.62	0.34	0.36
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	20.64	22.46	23.12	22.34	21.76
a. Bangunan	16.42	16.06	16.21	16.40	16.80
b. Mesin dan Perlengkapan Dalam Negeri	0.11	0.18	0.21	0.32	0.32
c. Mesin dan Perlengkapan Luar Negeri	2.46	3.51	3.57	3.02	2.34
d. Alat Angkutan Dalam Negeri	0.30	0.78	0.99	0.85	0.89
e. Alat Angkutan Luar Negeri	0.59	0.93	1.16	0.93	0.59
f. Lainnya Dalam Negeri	0.55	0.70	0.75	0.62	0.61
g. Lainnya Luar Negeri	0.20	0.29	0.23	0.21	0.19
4. Perubahan Stok <sup>1</sup>	-1.08	-3.47	-3.17	-4.11	-4.40
5. Ekspor Barang dan Jasa	24.22	29.19	29.05	27.85	27.84
a. Barang	21.43	26.33	25.86	24.43	24.61
b. Jasa	2.78	2.86	3.19	3.42	3.23
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	21.53	24.85	25.99	23.83	23.34
a. Barang	15.33	18.34	16.23	14.90	14.89
b. Jasa	6.20	6.51	9.76	8.93	8.45
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

<sup>1</sup> Sisa

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

TABEL 21. LAJU PERTUMBUHAN PENGGUNAAN PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT KOMODITAS (PERSEN)

JENIS PENGELUARAN	1999	2000	2001	2002*	2003**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	29.37	1.52	14.35	15.13	10.60	14.19
a. Makanan	34.72	-3.98	17.28	14.57	5.67	13.65
b. Bukan Makanan	21.78	10.15	10.34	15.95	17.69	15.18
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (a+b-c)	33.47	24.99	24.94	16.58	23.81	24.76
a. Belanja Barang	30.91	80.15	-10.02	33.41	26.47	32.18
b. Belanja Pegawai + Penyusutan (NTB)	40.53	21.62	17.84	1.76	21.99	20.75
c. Penerimaan Barang dan Jasa	77.00	148.95	-61.56	-40.37	22.48	29.30
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	-7.01	22.06	13.84	3.85	8.03	8.16
a. Bangunan	9.49	13.25	11.79	9.44	14.00	11.59
b. Mesin dan Perlengkapan Dalam Negeri	-9.93	82.28	22.81	68.56	2.50	33.24
c. Mesin dan Perlengkapan Luar Negeri	-55.49	50.03	11.81	-15.39	-19.58	-5.72
d. Alat Angkutan Dalam Negeri	-16.05	188.72	42.36	-10.68	10.96	43.06
e. Alat Angkutan Luar Negeri	-28.19	71.34	39.86	-18.66	-31.24	6.62
f. Lainnya Dalam Negeri	47.82	39.31	18.65	-8.82	4.13	20.22
g. Lainnya Luar Negeri	-44.34	56.45	-10.09	-11.10	-6.65	-3.14
4. Ekspor Barang dan Jasa	-22.85	39.03	14.98	-7.57	-3.29	4.06
a. Minyak	-3.22	52.85	11.36	-8.66	2.80	11.02
b. Hasil Pertanian	-15.42	29.13	-34.61	-5.95	-12.30	-7.83
c. Hasil Industri	-28.78	41.03	15.53	-7.67	-4.51	3.12
d. Hasil Tambang	-21.79	29.34	58.70	-6.73	3.40	12.58
e. Barang Lainnya	-18.91	29.76	-80.56	-20.42	-15.44	-21.11
f. Jasa	-17.36	10.26	44.55	-5.72	-8.32	4.68
5. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-24.05	34.93	18.94	-6.41	-2.57	4.17
a. Barang Konsumsi	17.68	132.25	-60.02	-7.88	17.73	19.95
b. Bahan Baku	-20.46	23.77	17.03	-7.78	0.66	2.64
c. Barang Modal	-55.43	67.40	7.16	-7.14	-27.09	-3.02
d. Jasa	-20.64	14.31	88.71	-3.69	-2.80	15.18
6. PRODUK DOMESTIK BRUTO	15.06	15.02	16.03	9.74	10.94	13.36

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

TABEL 22. LAJU PERTUMBUHAN PENGGUNAAN PDB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993 MENURUT KOMODITAS (PERSEN)

JENIS PENGELUARAN	1999	2000	2001	2002*	2003**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	3.06	3.13	3.36	3.81	4.02	3.48
a. Makanan	1.22	1.28	-0.68	0.47	2.15	0.89
b. Bukan Makanan	5.36	5.34	8.01	7.34	5.87	6.38
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (a+b-c)	0.69	6.49	8.98	12.79	9.84	7.76
a. Belanja Barang	9.12	67.38	-21.87	25.49	24.36	20.90
b. Belanja Pegawai + Penyusutan (NTB)	1.66	1.37	1.06	0.40	0.94	1.09
c. Penerimaan Barang dan Jasa	31.16	114.55	-68.10	-42.53	9.01	8.82
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	-16.37	14.18	6.50	0.21	1.36	1.18
a. Bangunan	1.01	2.60	4.42	4.85	6.70	3.92
b. Mesin dan Perlengkapan Dalam Negeri	-40.76	78.28	16.90	61.82	2.53	23.75
c. Mesin dan Perlengkapan Luar Negeri	-58.08	49.67	5.20	-12.31	-19.23	-6.95
d. Alat Angkutan Dalam Negeri	-35.56	175.89	31.74	-11.43	10.16	34.16
e. Alat Angkutan Luar Negeri	-37.61	64.51	28.48	-16.96	-33.52	0.98
f. Lainnya Dalam Negeri	11.64	33.01	11.50	-14.04	2.53	8.93
g. Lainnya Luar Negeri	-55.76	53.32	-19.42	-4.78	-5.91	-6.51
4. Ekspor Barang dan Jasa	-31.80	26.48	2.93	-0.57	4.04	0.22
a. Barang	-31.61	28.92	1.59	-2.04	4.86	0.34
b. Jasa	-33.25	7.75	15.32	11.36	-1.79	-0.12
5. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-38.30	21.09	8.20	-4.95	1.96	-2.40
a. Barang	-43.03	25.48	-8.45	-4.81	4.04	-5.35
b. Jasa	-22.36	10.23	55.05	-5.19	-1.49	7.25
6. PRODUK DOMESTIK BRUTO	0.79	4.92	3.45	3.69	4.10	3.39

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

TABEL 23. INDEKS HARGA IMPLISIT PENGGUNAAN PDB MENURUT KOMODITAS  
(PERSEN, 1993=100)

JENIS PENGELUARAN	1999	2000	2001	2002*	2003**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	312.74	307.85	340.58	377.72	401.62
a. Makanan	350.93	332.71	392.90	448.04	463.47
b. Bukan Makanan	267.08	279.27	285.29	308.17	342.59
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (a+b-c)	268.86	315.56	361.76	373.90	421.45
a. Belanja Barang	296.26	318.85	367.21	390.38	397.00
b. Belanja Pegawai + Penyusutan (NTB)	256.67	307.96	359.07	363.93	439.79
c. Penerimaan Barang dan Jasa	258.54	300.00	361.51	375.10	421.44
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	288.71	308.63	329.91	341.90	364.40
a. Bangunan	297.33	328.17	351.33	366.68	391.77
b. Mesin dan Perlengkapan Dalam Negeri	219.63	224.56	235.93	245.75	245.66
c. Mesin dan Perlengkapan Luar Negeri	255.23	255.85	271.94	262.38	261.25
d. Alat Angkutan Dalam Negeri	224.61	235.06	254.00	256.14	258.00
e. Alat Angkutan Luar Negeri	316.63	329.78	359.00	351.63	363.73
f. Lainnya Dalam Negeri	217.12	227.41	242.00	256.70	260.69
g. Lainnya Luar Negeri	238.87	243.76	271.99	253.92	251.92
4. Ekspor Barang dan Jasa	425.15	467.32	522.02	485.27	451.08
a. Barang	437.80	481.64	534.54	503.38	466.66
b. Jasa	327.78	335.43	420.46	355.98	332.31
5. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	384.05	427.95	470.42	463.19	442.61
a. Barang	411.42	463.44	513.23	497.72	466.68
b. Jasa	316.37	328.06	399.27	405.56	400.19
6. PRODUK DOMESTIK BRUTO	289.90	317.81	356.44	377.23	402.00

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

TABEL 24. LAJU PERTUMBUHAN INDEKS HARGA IMPLISIT PENGGUNAAN PDB MENURUT KOMODITAS  
(PERSEN, 1993=100)

JENIS PENGELUARAN	1999	2000	2001	2002*	2003**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	25.53	-1.56	10.63	10.91	6.33
a. Makanan	33.10	-5.19	18.09	14.04	3.44
b. Bukan Makanan	15.58	4.56	2.16	8.02	11.17
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (a+b-c)	32.55	17.37	14.64	3.36	12.72
a. Belanja Barang	19.97	7.63	15.17	6.31	1.70
b. Belanja Pegawai + Penyusutan (NTB)	38.23	19.98	16.60	1.35	20.84
c. Penerimaan Barang dan Jasa	34.95	16.03	20.50	3.76	12.36
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	11.19	6.90	6.90	3.63	6.58
a. Bangunan	8.39	10.37	7.06	4.37	6.84
b. Mesin dan Perlengkapan Dalam Negeri	52.06	2.25	5.06	4.16	-0.04
c. Mesin dan Perlengkapan Luar Negeri	6.19	0.24	6.29	-3.51	-0.43
d. Alat Angkutan Dalam Negeri	30.27	4.65	8.05	0.84	0.72
e. Alat Angkutan Luar Negeri	15.10	4.15	8.86	-2.05	3.44
f. Lainnya Dalam Negeri	32.41	4.74	6.42	6.07	1.56
g. Lainnya Luar Negeri	25.81	2.05	11.58	-6.64	-0.79
4. Ekspor Barang dan Jasa	13.13	9.92	11.71	-7.04	-7.05
a. Barang	12.09	10.01	10.98	-5.83	-7.29
b. Jasa	23.80	2.33	25.35	-15.34	-6.65
5. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	33.33	7.53	29.91	-1.68	-6.35
a. Barang	31.57	12.65	10.74	-3.02	-6.24
b. Jasa	2.21	3.70	21.71	1.58	-1.32
6. PRODUK DOMESTIK BRUTO	14.16	9.63	12.16	5.83	6.57

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

TABEL 25. KONTRIBUSI KOMPONEN PENGGUNAAN PDB TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN PDB  
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993 (PERSEN)

JENIS PENGELUARAN	1999	2000	2001	2002*	2003**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	2.12	2.21	2.34	2.64	2.79
a. Makanan	0.47	0.49	-0.25	0.17	0.74
b. Bukan Makanan	1.65	1.72	2.59	2.48	2.05
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (a+b-c)	0.05	0.46	0.65	0.97	0.82
a. Belanja Barang	0.19	1.51	-0.78	0.69	0.80
b. Belanja Pegawai + Penyusutan (NTB)	0.10	0.08	0.06	0.02	0.05
c. Penerimaan Barang dan Jasa	0.24	1.13	-1.37	-0.26	0.03
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	-4.07	2.93	1.46	0.05	0.30
a. Bangunan	0.17	0.43	0.71	0.79	1.10
b. Mesin dan Perlengkapan Dalam Negeri	-0.07	0.08	0.03	0.13	0.01
c. Mesin dan Perlengkapan Luar Negeri	-3.44	1.22	0.18	-0.44	-0.58
d. Alat Angkutan Dalam Negeri	-0.16	0.52	0.25	-0.11	0.09
e. Alat Angkutan Luar Negeri	-0.36	0.38	0.27	-0.20	-0.31
f. Lainnya Dalam Negeri	0.06	0.18	0.08	-0.11	0.02
g. Lainnya Luar Negeri	-0.26	0.11	-0.06	-0.01	-0.01
4. Ekspor Barang dan Jasa	-11.38	6.41	0.86	-0.17	1.13
a. Barang	-9.99	6.20	0.42	-0.53	1.19
b. Jasa	-1.40	0.22	0.44	0.36	-0.06
5. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-13.47	4.54	2.04	-1.29	0.47
a. Barang	-11.67	3.91	-1.55	-0.78	0.60
b. Jasa	-1.80	0.63	3.59	-0.51	-0.13
6. PRODUK DOMESTIK BRUTO	0.79	4.92	3.45	3.69	4.10

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara